



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023
(PPAS)**

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022**



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2023	iv

BAB I	PENDAHULUAN	1-1
	I.1. Latar Belakang	I-1
	I.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	I-2
	I.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	I-2
	I.4. Sistematika Penyusunan PPAS	I.4
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH	II-1
	PENDAPATAN DAERAH	II.2
	II.1 Pendapatan Asli Daerah	II-2
	II.2 Pendapatan Transfer	II-3
	II.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	II-4
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	
	1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Balangan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	III.2
	2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	III. 13
	3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas... Daerah	III.21
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	
	A. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IV-1
	B. Perkiraan Plafon Anggaran Belanja Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	IV-114
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	PENUTUP	V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Struktur Pagu Indikatif Pendapatan Daerah TA.2023.....	II-4
Tabel 3.1.	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Balangan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	III-3
Tabel 3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	III-13
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	III-21
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rincian Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	IV-1
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023.....	IV-117
Tabel 5.1	Perkiraan Rincian Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	V-1
Tabel Lampiran	Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4/010/DPRD-BLG/TAHUN 2022
NOMOR : 130.13/010.1/PEM/2022
TANGGAL : 08 Agustus 2022
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PPAS-APBD)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4/010/ DPRD-BLG/TAHUN 2022

NOMOR : 130.13/ 010.1/PEM/ 2022

TANGGAL : 08 Agustus 2022

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**
Jabatan : Bupati Balangan
Alamat Kantor : A.Yani Km. 3,5 Paringin
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : **AHSANI FAUZAN, SE.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Balangan
Alamat Kantor : Jl. A.Yani Km. 1,5 Paringin
b. Nama : **M. IFDALI, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Balangan
Alamat Kantor : Jl. A.Yani Km. 1,5 Paringin
c. Nama : **HANIL TAMJID**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan
Alamat Kantor : Jl. A.Yani Km. 1,5 Paringin
sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Balangan tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2023, maka disusunlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, plafon per urusan SKPD, plafon program, kegiatan dan sub Kegiatan, plafon belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, pengeluaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Paringin, Agustus 2022

BUPATI BALANGAN

PIHAK PERTAMA



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
PIHAK KEDUA

AHSANI FAUZAN, SE
KETUA

M. IFDALI, S.Sos
WAKIL KETUA I

HANIL TAMJID
WAKIL KETUA II

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Paringin, Agustus 2022

BUPATI BALANGAN

PIHAK PERTAMA

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
PIHAK KEDUA



AHSANI FAUZAN, SE
KETUA

M. IFDALI, S.Sos
WAKIL KETUA I

HANIL TAMJID
WAKIL KETUA II



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen APBD berpedoman pada dokumen KUA dan PPAS yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada RKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2023, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Balangan ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara serta penanganan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama tahun 2020.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah untuk:

1. menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
2. sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3 Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia I-3 Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
 - 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - 14) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14)
 - 15) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana



Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten balangan Tahun 2021- 2026;

- 16) Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023;

1.4 Sistematika Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Tahun 2023.

Bab II Rencana Penerimaan; Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

Menguraikan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang meliputi PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta rencana penerimaan Pembiayaan.

Bab III Prioritas Belanja Daerah

Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah.

Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja dan plafon anggaran sementara berdasarkan program/kegiatan, belanja Operasi, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Bab V Rencana Pembiayaan Daerah

Menguraikan tentang rencana penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah serta ringkasan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

Bab VI Penutup

Penutup.



BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan Daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang digolongkan atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan daerah dalam hal penganggarkannya dituntut harus dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil dan lain sebagainya.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempertimbangkan kasus pandemi Covid-19 pada tahun 2022 yang diharapkan sudah mengarah ke fase endemic. Yang nantinya akan memberi dampak pada tahun 2023 pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, maka komposisi APBD di tahun 2023 mengalami penyesuaian dari target semula sesuai dengan RPJMD tahun 2021–2026 dengan mempertimbangkan



prediksi kondisi makro ekonomi secara Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan serta Pemerintah Daerah kabupaten Balangan tahun 2023.

Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023:

2.1 Pendapatan Daerah

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Adapun target Pendapatan Daerah TA. 2023 berdasarkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.085.377.647.958 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp1.182.487.633.244,00 berdasarkan proyeksi dan realisasi tahun sebelumnya maka, proyeksi tahun 2023 berdasarkan kondisidiproyeksikan Rp1.308.242.953.105,00 atau ada peningkatan 10,63% sebesarRp125.755.319.861,00.

2.2 Rencana Penerimaan Daerah

Berikut dijabarkan komposisi Rencana Penerimaan Daerah tahun anggaran 2023 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2021, dan target tahun 2022.

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan berdasarkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp130.505.127.089,00 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp80.081.793.282,00 maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.75.207.258.220,00 mengalami penurunan sebesar 6,09% atau sebesar Rp4.874.535.062,00 Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Balangan terdiri dari 12 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak



Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak sarang burung walet.

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.11.417.071.564,50, sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp.11.765.022.948,00 maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.12.194.000.000,00 naik sebesar Rp428.977.052,00 atau 3,65%.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp.1.890.123.555,00 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp1.853.889.000,00 maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.1.782.329.000,00 turun sebesar 3,86% atau sebesar Rp71.560.000,00.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2021 sebesar Rp.12.391.951.413,00 sedangkan target pada Tahun 2022 sebesar Rp.10.847.692.278,00 maka pada Tahun 2023 diproyeksikan naik sebesar Rp.4.389.767.722,00 atau 40,47% menjadi sebesar Rp.15.237.460.000,00.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp104.805.980.556,21 sedangkan target pada Tahun 2022 sebesar Rp. 55.615.189.056,00 maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah pada Tahun 2023 sebesar Rp.45.993.469.220,00 atau turun sebesar Rp.9.621.719.836,00 atau 17,30%.

2.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.928.215.278.041,00 sedangkan target pada Tahun 2022 sebesar Rp1.091.405.839.962,00 maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.1.270.201.753.468,00 Mengalami kenaikan sebesar Rp.178.795.913.506,00 atau sebesar 16,38%. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi;

1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp869.042.358.904,00 sedangkan target pada Tahun 2022 sebesar Rp1.014.707.472.562,00 maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.158.381.453.468,00 mengalami



kenaikan sebesar 14,16% atau sebesar Rp143.673.980.906,00 yang terdiri dari:

- a) Dana Perimbangan sebesar Rp1.049.601.204.468,00 meliputi:
 - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp630.475.857.355,00
 - 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp346.527.140.000,00
 - 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp72.598.207.113,00
- b) Dana Desa sebesar Rp108.780.249.000,00.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi tahun 2021 sebesar Rp59.172.919.137,00 sedangkan target pada Tahun 2022 sebesar Rp76.698.367.400,00 maka pada Tahun 2023 diproyeksikan meningkat sebesar Rp35.121.932.600,00 atau 45,79% atau menjadi Rp111.820.300.000,00 yang terdiri dari :

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak kendaraan Bermotor sebesar Rp10.200.000.000,00
- b) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp11.000.000.000,00
- c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp80.200.000.000,00
- d) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp420.300.000,00
- e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp10.000.000.000,00

2.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan realisasi pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2021 sebesar Rp26.657.242.828,00 dan target pada Tahun 2022 sebesar Rp11.000.000.000,00 oleh karena itu proyeksi untuk tahun 2023 sebesar Rp.6.176.710.373,00 atau turun sebesar Rp4.823.289.627,00 yang disebabkan pemindahan dari pendapatan BOS yang biasanya menjadi alokasi pendapatan lainnya ke pendapatan transfer pemerintah Pusat. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi;

- a. Sumbangan pihak ketiga berupa lumpsum paymant sebesar Rp.6.176.710.373,00



Adapun Sumber-sumber penerimaan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 dituangkan kedalam tabel 2.1 berikut:



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/B erkurang	%
PENDAPATAN DAERAH	1.085.377.648	1.182.487.633	1.351.455.722	168.968.089	14,29
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.505.127	80.081.793	75.077.258	(5.004.535)	(6,25)
Pajak Daerah	11.417.072	11.765.023	12.194.000	428.977	3,65
Pajak Hotel	11.138	13.500	13.500	-	-
Pajak Hotel	-	13.500	13.500	-	-
Pajak Hotel	-	13.500	13.500	-	-
Pajak Losmen	11.138	-	-	-	-
Pajak Losmen	11.138	-	-	-	-
Pajak Restoran	4.741.558	4.635.684	4.700.000	64.316	1,39
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	161.758	135.684	200.000	64.316	47,40
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	161.758	135.684	200.000	64.316	47,40
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.579.800	4.500.000	4.500.000	-	-
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.579.800	4.500.000	4.500.000	-	-
Pajak Hiburan	1.035	4.000	4.000	-	-
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	1.000	1.000	-	-
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	1.000	1.000	-	-
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.035	3.000	3.000	-	-
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.035	3.000	3.000	-	-
Pajak Reklame	80.660	50.339	75.000	24.661	48,99
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	80.660	50.339	75.000	24.661	48,99
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	80.660	50.339	75.000	24.661	48,99
Pajak Penerangan Jalan	3.642.369	3.480.000	3.600.000	120.000	3,45
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.642.369	3.480.000	3.600.000	120.000	3,45
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.642.369	3.480.000	3.600.000	120.000	3,45
Pajak Parkir	14.410	20.500	20.500	-	-



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/B erkurang	%
Pajak Parkir	14.410	20.500	20.500	-	-
Pajak Parkir	14.410	20.500	20.500	-	-
Pajak Air Tanah	4.310	6.000	6.000	-	-
Pajak Air Tanah	4.310	6.000	6.000	-	-
Pajak Air Tanah	4.310	6.000	6.000	-	-
Pajak Sarang Burung Walet	-	20.000	25.000	5.000	25,00
Pajak Sarang Burung Walet	-	20.000	25.000	5.000	25,00
Pajak Sarang Burung Walet	-	20.000	25.000	5.000	25,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	859.467	1.600.000	1.600.000	-	-
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	859.467	1.600.000	1.600.000	-	-
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	859.467	1.600.000	1.600.000	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	657.250	635.000	650.000	15.000	2,36
PBBP2	657.250	635.000	650.000	15.000	2,36
PBBP2	657.250	635.000	650.000	15.000	2,36
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.404.873	1.300.000	1.500.000	200.000	15,38
BPHTB-Pemindahan Hak	1.404.873	1.000.000	1.300.000	300.000	30,00
BPHTB-Pemindahan Hak	1.404.873	1.000.000	1.300.000	300.000	30,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	300.000	200.000	(100.000)	(33,33)
BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	300.000	200.000	(100.000)	(33,33)
Retribusi Daerah	1.890.124	1.853.889	1.652.329	(201.560)	(10,87)
Retribusi Jasa Umum	905.527	949.010	718.710	(230.300)	(24,27)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	236.690	150.000	150.000	-	-
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	236.690	150.000	150.000	-	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	246.892	384.760	250.960	(133.800)	(34,77)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	246.892	384.760	250.960	(133.800)	(34,77)



Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	63.200	70.000	70.000	-	-
Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/B erkurang	%
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	63.200	70.000	70.000	-	-
Retribusi Pelayanan Pasar	64.000	60.750	61.750	1.000	1,65
Retribusi Pelataran	39.300	1.000	1.500	500	50,00
Retribusi Los	24.700	59.750	60.250	500	0,84
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	222.653	120.000	120.000	-	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	222.653	120.000	120.000	-	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	9.356	120.000	6.000	(114.000)	(95,00)
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	9.356	120.000	6.000	(114.000)	(95,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	62.737	43.500	60.000	16.500	37,93
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	62.737	43.500	60.000	16.500	37,93
Retribusi Jasa Usaha	766.940	749.379	627.619	(121.760)	(16,25)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	456.829	419.969	318.569	(101.400)	(24,14)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	35.752	199.369	179.569	(19.800)	(9,93)
Retribusi Penyewaan Tanah	-	6.000	6.000	-	-
Retribusi Penyewaan Bangunan	-	41.600	44.000	2.400	5,77
Retribusi Pemakaian Laboratorium	73.281	90.000	5.000	(85.000)	(94,44)
Retribusi Pemakaian Ruang	339.246	76.000	78.000	2.000	2,63
Retribusi Pemakaian Alat	8.550	7.000	6.000	(1.000)	(14,29)
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	193.900	183.410	192.050	8.640	4,71
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	129.460	183.410	192.050	8.640	4,71
Retribusi Terminal	61.350	46.000	47.000	1.000	2,17
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	53.550	40.000	40.000	-	-
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	7.800	6.000	7.000	1.000	16,67
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	54.861	100.000	70.000	(30.000)	(30,00)



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/B erkurang	%
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	54.861	100.000	70.000	(30.000)	(30,00)
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau BenihTanaman, Ternak, dan Ikan	-	-	130.000	130.000	-
Retribusi Perizinan Tertentu	217.657	155.500	306.000	150.500	96,78
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	217.657	155.500	6.000	(149.500)	(96,14)
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	217.657	155.500	6.000	(149.500)	(96,14)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	300.000	300.000	-
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	300.000	300.000	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.391.951	10.847.692	15.237.460	4.389.768	40,47
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.391.951	10.847.692	15.237.460	4.389.768	40,47
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.391.951	10.847.692	15.237.460	4.389.768	40,47
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.391.951	10.847.692	15.237.460	4.389.768	40,47
Lain-lain PAD yang Sah	104.805.981	55.615.189	45.993.469	(9.621.720)	(17,30)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	84.080	-	-	-	-
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	84.080	-	-	-	-
Hasil Penjualan Alat Angkutan	84.080	-	-	-	-
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	23.300	15.000	10.000	(5.000)	(33,33)
Hasil Sewa BMD	23.300	15.000	10.000	(5.000)	(33,33)
Hasil Sewa BMD	23.300	15.000	10.000	(5.000)	(33,33)
Jasa Giro	6.118.995	4.850.000	4.850.000	-	-
Jasa Giro pada Kas Daerah	6.039.509	4.800.000	4.800.000	-	-
Jasa Giro pada Kas Daerah	6.039.509	4.800.000	4.800.000	-	-
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	79.486	50.000	50.000	-	-



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/B erkurang	%
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	79.486	50.000	50.000	-	-
Pendapatan Bunga	116.356	4.000.000	4.000.000	-	-
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	116.356	4.000.000	4.000.000	-	-
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	116.356	4.000.000	4.000.000	-	-
Pendapatan BLUD	89.661.740	40.000.000	30.000.000	(10.000.000)	(25,00)
Pendapatan BLUD	89.661.740	40.000.000	30.000.000	(10.000.000)	(25,00)
Pendapatan BLUD	89.661.740	40.000.000	30.000.000	(10.000.000)	(25,00)
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.490.332	6.745.689	7.133.469	387.780	5,75
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.490.332	6.745.689	7.133.469	387.780	5,75
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.490.332	6.745.689	7.133.469	387.780	5,75
PENDAPATAN TRANSFER	928.215.278	1.091.405.840	1.270.201.753	178.795.914	16,38
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	869.042.359	1.014.707.473	1.158.381.453	143.673.981	14,16
Dana Perimbangan	717.757.009	892.594.095	1.049.601.204	157.007.110	17,59
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	257.465.533	398.704.760	630.475.857	231.771.097	58,13
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	42.271.901	18.650.525	18.650.525	-	-
DBH PPh Pasal 21	8.432.381	8.265.869	8.265.869	-	-
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	183.123	2.959.682	2.959.682	-	-
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1	-	-	-	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	113.048	124.689	124.689	-	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	239.811	768.245	384.123	(384.123)	(50,00)
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	204.569.499	365.355.849	597.511.069	232.155.220	63,54
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	127.000	1.588.989	1.588.989	-	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	-	148.155	148.155	-	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasai (DR)	171.149	-	-	-	-



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/B erkurang	%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.357.619	842.756	842.756	-	-
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	346.527.140	346.527.140	346.527.140	-	-
DAU	346.527.140	346.527.140	346.527.140	-	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	59.779.052	89.764.710	72.598.207	(17.166.503)	(19,12)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	89.764.710	16.655.057	(73.109.653)	(81,45)
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	-	-	-	-
DAK Non Fisik-TPG PNSD	48.394.510	-	47.021.000	47.021.000	-
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	324.000	-	1.450.000	1.450.000	-
DAK Non Fisik-TKG PNSD	938.690	-	2.200.000	2.200.000	-
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.986.800	-	4.041.250	4.041.250	-
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.513.300	-	1.230.900	1.230.900	-
Dana Insentif Daerah (DID)	34.187.576	13.333.129	-	(13.333.129)	(100,00)
DID	34.187.576	13.333.129	-	(13.333.129)	(100,00)
DID	34.187.576	13.333.129	-	(13.333.129)	(100,00)
Dana Desa	117.097.774	108.780.249	108.780.249	-	-
Dana Desa	117.097.774	108.780.249	108.780.249	-	-
Dana Desa	117.097.774	108.780.249	108.780.249	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.172.919	76.698.367	111.820.300	35.121.933	45,79
Pendapatan Bagi Hasil	59.172.919	76.698.367	111.820.300	35.121.933	45,79
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.172.919	76.698.367	111.820.300	35.121.933	45,79
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.016.268	9.225.911	10.200.000	974.089	10,56
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.333.030	10.051.037	11.000.000	948.963	9,44
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.611.101	48.780.048	80.200.000	31.419.952	64,41
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	326.679	70.000	420.300	350.300	500,43
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.885.841	8.571.371	10.000.000	1.428.629	16,67
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.657.243	11.000.000	6.176.710	(4.823.290)	(43,85)



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/B erkurang	%
Pendapatan Hibah	6.776.710	11.000.000	6.176.710	(4.823.290)	(43,85)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.276.710	11.000.000	6.176.710	(4.823.290)	(43,85)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.276.710	11.000.000	6.176.710	(4.823.290)	(43,85)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.276.710	11.000.000	6.176.710	(4.823.290)	(43,85)



BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk mendanai seluruh belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di masa pandemi covid-19 dilakukan secara selektif. Pada Tahun Anggaran 2023 pandemi covid-19 diharapkan sudah masuk pada fase endemi. Sehingga arah pembiayaan baik dibidang ekonomi, sosial, dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik baik, kesehatan maupun pendidikan digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meski masih ada menyisakan penanganan untuk covid-19. Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disusun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan daerah serta diselaraskan dan disinkronkan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2023 dan Prioritas Provinsi.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Oleh karena itu, program dan rencana kerja pemerintah daerah akan disenergikan terhadap prioritas provinsi dan nasional melalui;

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.
3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.
4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja



Yang akan dijabarkan sebagaimana tabel berikut;



1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Balangan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Tabel 3.1

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Balangan
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			Persentase cadangan pangan masyarakat		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Persentase cadangan pangan pemerintah daerah		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			PERSENTASE KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			0 Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
			Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP0		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Ikan (ton)		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase peningkatan kunjungan wisata		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PRODUK YANG DIPASARKAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			PERSENTASE PRODUK INDUSTRI YANG BERSERTIFIKAT HALAL		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)		
				KECAMATAN LAMPIHONG	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Nilai / predikat LAKIP SKPD		
				KECAMATAN BATUMANDI	
			Presentase ASN yang terpenuhi Hak keuangannya		
				KECAMATAN BATUMANDI	
			Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		
				KECAMATAN AWAYAN	
			Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		
				KECAMATAN AWAYAN	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)		
				KECAMATAN HALONG	
			ONilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				KECAMATAN JUAI	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				KECAMATAN JUAI	
			Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya		
				KECAMATAN PARINGIN	
			Persentase Tingkat Disiplin Aparatus		
				KECAMATAN PARINGIN	
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN PARINGIN	
			Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		
				KECAMATAN PARINGIN	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		
				KECAMATAN AWAYAN	
			Persentase PATEN yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan		
				KECAMATAN HALONG	
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		
				KECAMATAN PARINGIN	
			Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	
			Persentase PATEN Yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		
				KECAMATAN AWAYAN	
			Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa		
				KECAMATAN JUAI	
			Kesadaran Masyarakat dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni		
				KECAMATAN PARINGIN	
			Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
				KECAMATAN PARINGIN	
			Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	
			Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	
			Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	
			Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Awayan		
				KECAMATAN AWAYAN	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan		
				KECAMATAN PARINGIN	
			Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum		
				KECAMATAN AWAYAN	
			Persentase Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		
				KECAMATAN PARINGIN	
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Awayan		
				KECAMATAN AWAYAN	
			Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		
				KECAMATAN JUAI	
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		
				KECAMATAN PARINGIN	
			Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN TEBING TINGGI	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Peningkatan pelayanan publik urusan pemerintah daerah		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka Kematian Bayi (AKB)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Angka Kematian Ibu (AKI)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Angka Kesakitan		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Sakip SKPD		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase prestasi olah raga yang diraih		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Indeks pembangunan literasi Masyarakat		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Persentase Aset dalam Kondisi Baik		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Persentase Aset dalam Kondisi Baik		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
			"Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Tingkat kelancaran pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, Cakupan sarana kerja aparatur, Persentase tingkat Disiplin Aparatur, Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang tercatat, Tingkat validasi aset yang akan dimusnahkan, Persentase SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB P-2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan Non PAD		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
			Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			
			Pesentase pengelolaan izin membuka tanah		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pesentase penatagunaan tanah		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang di susun setiap tahun		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di Kelola		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase Pengawasan Rekomendasi Lingkungan yang di Terbitkan		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
			Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Keraifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diterima masyarakat		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang tangani		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Peningkatan Pengelolaan Persampahan		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Nilai akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) DISDUKCAPIL		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Indek Pengawasan Kearsipan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Indek Pengawasan Kearsipan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				SEKRETARIAT DPRD	
			Laporan		
				SEKRETARIAT DPRD	
			Prosentase pemenuhan administrasi laporan keuangan		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				SEKRETARIAT DPRD	
			Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Nilai Predikat Akuntabilitas Kinerja		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Pemeliharaan Barang Milik daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Nilai predikat indeks inovasi daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Persentase Penelitian dan Pengembangan daerah yang dimanfaatkan		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat		



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				INSPEKTORAT	
			Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik		
				INSPEKTORAT	
			Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	



2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Tabel 3.2**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
54	02. Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			Persentase cadangan pangan masyarakat		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	333.570.600
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Persentase cadangan pangan pemerintah daerah		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	632.877.600
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase penurunan daerah rentan rawan pangan		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	178.132.700
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	32.636.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			OCAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20.934.400



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.164.233.350
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	72.167.600
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			PERSENTASE KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39.046.400
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			OPERSENTASE USAHA MIKRO YANG LABANYA MENINGKAT		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	285.370.400
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTAMBAH		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	277.956.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DISPORAPAR		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	9.128.950.172
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	833.938.100
			Persentase wira usaha muda		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	833.938.100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase prestasi olah raga yang diraih		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	8.368.756.300
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan dalam		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	756.674.600
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Ikan		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	227.482.500
			Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Ikan (ton)		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.513.863.200
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Persentase Kawasan Perikanan Lestari		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	137.346.200
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	471.711.400

				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	26.849.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase peningkatan kunjungan wisata		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	839.242.700
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Rata-rata lama kunjungan wisata		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	910.448.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Persentase peningkatan SDM sektor pariwisata		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	242.154.600
			persentase produk kreasi unggulan		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	242.154.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	22.219.999.974
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			

				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	7.794.111.600
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			

				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	21.909.887.700
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			

				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	736.005.700



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			

				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	757.118.350
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			

				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.392.884.900
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	57.010.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			PERSENTASE PENINGKATAN SAPRAS		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	949.088.500
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	114.664.100
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA SETELAH PROMOSI		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	467.513.800
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			PERSENTASE ALAT – ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	210.812.300
			PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	210.812.300
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PRODUK YANG DIPASARKAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	46.210.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	196.141.800
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			PERSENTASE PRODUK INDUSTRI YANG BERSERTIFIKAT HALAL		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	79.758.300
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			PROFIL IKM YANG BERKEMBANG		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	936.995.800
55	03. Memperkuat Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	300.038.400



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Nilai Sakip SKPD		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	16.563.516.167
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	28.967.320.100
			"Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	28.967.320.100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8.444.640.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	6.200.982.200
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	31.004.216.600
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Jumlah bangunan yang ditata		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	5.370.635.100



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase Jalan dalam kondisi mantap		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	98.267.570.000
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	98.267.570.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUJK yang dibina		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.985.009.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.744.745.900
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	594.694.600
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.497.850.650
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.165.638.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	44.201.086.300
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	59.368.300
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	52.598.600
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.861.232.500
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.191.123.700
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	248.330.700
			Persentase PPHI yang difasilitasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	248.330.700
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di Kelola		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	31.515.800
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)		
				DINAS PERHUBUNGAN	1.210.733.600
			Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan		
				DINAS PERHUBUNGAN	472.939.000
			Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan		
				DINAS PERHUBUNGAN	17.583.986.200
			Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai		
				DINAS PERHUBUNGAN	51.533.000
			Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek		
				DINAS PERHUBUNGAN	398.809.000
			Presentase Sarana Prasarana Perpustakaan yang memadai		
				DINAS PERHUBUNGAN	90.610.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6.774.323.009
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6.774.323.009
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6.630.971.900
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	4.021.794.152
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	4.021.794.152
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			ONilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	635.719.000
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	10.787.100.263

				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	109.514.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	82.437.400
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	58.443.600
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			0 Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	426.926.800
			Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP0		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	426.926.800
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	87.980.800
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	106.140.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	214.436.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	28.634.800
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase warga transmigrasi yang terampil		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	111.352.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	198.477.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
				KECAMATAN PARINGIN	8.707.200
56	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.353.851.229
			Persentase dan fasilitasi pemeliharaan barang milik Daerah		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	109.813.800
			Persentase Fasilitasi Pengadaan barang milik Daerah		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	52.098.600
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.040.907.700



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	141.014.400
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	77.136.800
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	79.521.200
			IPG (Indeks Pembangunan gender)		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	79.521.200
			Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	79.521.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) DISDUKCAPIL		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.769.494.538



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	278.343.900
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	213.426.800
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	174.481.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Persentase pengelolaan profil kependudukan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.862.500
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	719.319.200
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.513.636.500
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.513.636.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku		
				DINAS PERHUBUNGAN	4.440.560.185
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS PERHUBUNGAN	5.634.186.605
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Indek Pengawasan Kearsipan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	809.901.500
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Indek Pengawasan Kearsipan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	427.470.300
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
			Indek Pengawasan Kearsipan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	187.026.800
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan Administrasi Kewilayahan dan Otonomi dan Kerjasama Daerah yang Terlaksana dan Berkualitas		
				SEKRETARIAT DAERAH	208.592.000
			Persentase Kebijakan di Bidang Perundang-undangan, Bidang Bantuan Hukum dan Bidang Dokumentasi dan Informasi yang terlaksana dan berkualitas		
				SEKRETARIAT DAERAH	341.727.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				SEKRETARIAT DPRD	316.755.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Laporan		
				SEKRETARIAT DPRD	316.755.000
			Laporan administrasi keuangan		
				SEKRETARIAT DPRD	3.454.350.496
			Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		
				SEKRETARIAT DPRD	17.063.752.480
			Prosentase pemenuhan administrasi laporan keuangan		
				SEKRETARIAT DPRD	4.255.685.496
			Prosentase Pemenuhan Administrasi Sarana dan Prasarana		
				SEKRETARIAT DPRD	8.479.406.550
			Waktu Pelayanan Administrasi Keuangan		
				SEKRETARIAT DPRD	3.331.499.000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH		
				SEKRETARIAT DPRD	250.151.800
			PRESENTASE ASPIRASI MASYARAKAT YANG DAPAT DI AKOMODIR(DI BAHAS) OLEH DPRD		
				SEKRETARIAT DPRD	1.151.332.700
			PRESENTASE KEGIATAN DPRD YANG TERPUBLIKASI DAN TERAKSES OLEH PUBLIK		
				SEKRETARIAT DPRD	7.249.805.300
			PRESENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		
				SEKRETARIAT DPRD	214.005.200
			PRESENTASE RAPERDA YANG TELAH DIBAHAS OLEH DPRD DAN DISAMPAIKAN KE BAGIAN HUKUM		
				SEKRETARIAT DPRD	4.171.332.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan jasa administrasi keuangan		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.704.973.015
			Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.774.774.050
			Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.704.973.015
			Nilai Predikat Akuntabilitas Kinerja		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	282.995.200
			Pemeliharaan Barang Milik daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	353.500.850
			Pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	843.693.800
			Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	617.353.200
			Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	960.226.200
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional, provinsi, kabupaten)		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.443.030.500
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gakorpemerintahan & pembangunan manusia)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.151.638.700
			Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi & infrastruktur dengan nilai baik		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.077.655.000
			Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan & pembangunan manusia dengan nilai baik		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.151.638.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	166.429.800
			Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, Cakupan sarana kerja aparatur, Persentase tingkat Disiplin Aparatur, Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.933.361.460
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	289.710.000
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	896.689.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.574.175.200
			Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	14.388.297.642
			Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	859.717.809
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	233.896.326.340
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.010.347.300
			% SKPD menyampaikan RKA tepat waktu, % survey kepuasan Pelayanan, % SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan, % Laporan Keuangan Daerah disampaikan Tepat Waktu, % SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.723.567.600
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.926.431.200
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang tercatat, Tingkat validasi aset yang akan dimusnahkan, Persentase SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Daerah		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.243.230.400
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB P-2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan Non PAD		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.311.126.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.406.382.040
			Persentase Aset dalam Kondisi Baik		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.406.382.040
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.564.504.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.431.528.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Nilai predikat indeks inovasi daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	318.520.800
			Nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.784.887.100
			Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.443.160.000
			Persentase Penelitian dan Pengembangan daerah yang dimanfaatkan		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	660.247.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat		
				INSPEKTORAT	10.487.832.910
			Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik		
				INSPEKTORAT	10.487.832.910
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan		
				INSPEKTORAT	3.374.460.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Indeks Integritas		
				INSPEKTORAT	794.032.400
			Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM		
				INSPEKTORAT	794.032.400
			Level kapabilitas APIP		
				INSPEKTORAT	794.032.400
			Level Maturitas SPIP		
				INSPEKTORAT	794.032.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Nilai Akuntabilitas Kinerja		
				KECAMATAN LAMPIHONG	3.612.979.191
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)		
				KECAMATAN LAMPIHONG	154.470.700
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)		
				KECAMATAN LAMPIHONG	333.021.900
			Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD		
				KECAMATAN LAMPIHONG	144.527.900
			Nilai / predikat LAKIP SKPD		
				KECAMATAN BATUMANDI	3.335.000
			Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayanan		
				KECAMATAN BATUMANDI	118.030.900
			Presentase ASN yang terpenuhi Hak keuangannya		
				KECAMATAN BATUMANDI	3.687.229.573
			Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		
				KECAMATAN BATUMANDI	96.895.000
			Tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		
				KECAMATAN BATUMANDI	433.436.250
			Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		
				KECAMATAN AWAYAN	98.293.000
			Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		
				KECAMATAN AWAYAN	3.676.494.670
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)		
				KECAMATAN HALONG	3.547.659.020
			ONilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN JUAI	131.516.400
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				KECAMATAN JUAI	3.161.664.491
			Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi		
				KECAMATAN PARINGIN	13.996.000
			Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya		
				KECAMATAN PARINGIN	5.042.868.533
			Persentase Tingkat Disiplin Aparatus		
				KECAMATAN PARINGIN	12.753.000
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		
				KECAMATAN PARINGIN	1.236.899.750
			Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		
				KECAMATAN PARINGIN	12.753.000
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	2.933.540.450
			Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	23.443.300
			Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan Yang Berlaku		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	4.201.135.370
			Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	375.654.700
			Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	322.518.700
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	2.727.100



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	145.247.800

				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	48.859.400
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Nilai IKM		
				KECAMATAN LAMPIHONG	47.617.000
			Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		
				KECAMATAN BATUMANDI	12.518.300
				KECAMATAN AWAYAN	103.532.500
			Persentase PATEN yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan		
				KECAMATAN HALONG	138.256.400
			Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		
				KECAMATAN JUAI	77.438.100
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		
				KECAMATAN PARINGIN	88.328.000
			Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	55.774.000
			Persentase PATEN Yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	43.560.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				KECAMATAN LAMPIHONG	329.823.000
			Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				KECAMATAN LAMPIHONG	60.524.300



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa		
				KECAMATAN BATUMANDI	273.101.400

				KECAMATAN BATUMANDI	25.000.000
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		
				KECAMATAN AWAYAN	309.472.000
			Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa		
				KECAMATAN HALONG	321.500.000

				KECAMATAN HALONG	25.000.000
			Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa		
				KECAMATAN JUAI	349.937.900
			Kesadaran Masyarakat dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni		
				KECAMATAN PARINGIN	68.118.000
			Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan		
				KECAMATAN PARINGIN	2.260.278.800
			Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
				KECAMATAN PARINGIN	220.600.000
			Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	220.572.500
			Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	1.189.181.000
			Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	234.300.000
			Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	61.312.500
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		
				KECAMATAN LAMPIHONG	65.011.000
			Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor		
				KECAMATAN BATUMANDI	7.167.400
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Awayan		
				KECAMATAN AWAYAN	68.416.600
			Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor		
				KECAMATAN HALONG	2.886.400
			Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor		
				KECAMATAN JUAI	82.544.500
			Jumlah Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan		
				KECAMATAN PARINGIN	22.025.200
			Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	40.798.000
			Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	26.620.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		
				KECAMATAN LAMPIHONG	213.055.600
			Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		
				KECAMATAN BATUMANDI	256.419.300
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum		
				KECAMATAN AWAYAN	235.634.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa		
				KECAMATAN HALONG	166.921.800
			Persentase desa tertib administrasi umum		
				KECAMATAN JUAI	247.950.400
			Persentase Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		
				KECAMATAN PARINGIN	249.900.100
			Persentase desa tertib administrasi umum		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	227.280.200
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	114.129.100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				KECAMATAN LAMPIHONG	117.721.500
			Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		
				KECAMATAN BATUMANDI	93.895.000
			Pesentase desa dengan administasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Awayan		
				KECAMATAN AWAYAN	156.028.200
			Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa		
				KECAMATAN HALONG	160.580.800
			Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		
				KECAMATAN JUAI	163.236.300
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		
				KECAMATAN PARINGIN	139.136.200
			Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		
				KECAMATAN TEBING TINGGI	140.572.200



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				KECAMATAN PARINGIN SELATAN	92.470.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.452.940.734
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.632.775.600
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase Parpol Yang Aktif		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.628.925.300
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase Ormas yang aktif		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	284.845.100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	124.156.400
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	611.378.000
57	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.547.041.103
			Tingkat kelancaran pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	27.339.600
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.861.211.300
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.000.121.300
			Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.113.564.800
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	45.872.100
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
			Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10.500.000
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			
			Pesentase pengelolaan izin membuka tanah		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	183.004.900
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Pesentase penatagunaan tanah		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	28.402.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	9.713.413.550



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang di susun setiap tahun		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	211.860.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	894.009.200
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.928.553.700
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di Kelola		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	35.629.900
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase Pengawasan Rekomendasi Lingkungan yang di Terbitkan		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	84.479.700
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
			Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Keraifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	20.186.500
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	25.338.000
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diterima masyarakat		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	108.957.000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang tangani		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	39.040.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Peningkatan Pengelolaan Persampahan		
				DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6.185.535.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26.450.000
			Persentase Aset dalam Kondisi Baik		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26.450.000
67	01. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Peningkatan pelayanan publik urusan pemerintah daerah		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	254.538.007.043
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Tingkat paritispasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	41.053.819.136

				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.435.700.077
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase Kurikulum yang sesuai peraturan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	115.951.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase peningkatan angka jumlah guru PNS yang s1 (PAUD, SD dan SMP)		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	731.300.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			

				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	73.020.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	126.509.981.432
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka Kematian Bayi (AKB)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	63.016.331.193
			Angka Kematian Ibu (AKI)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	63.016.331.193
			Angka Kesakitan		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	63.016.331.193
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	63.016.331.193

				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.133.469.220



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sesuai Standar		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.197.526.600
			Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.197.526.600
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			JUMLAH PRODUKSI RUMAH TANGGA YANG MEMPUNYAI SERTIFIKAT KEAMANAN PANGAN (analisa sendiri)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	82.828.200
			Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	82.828.200
			Persentase sarana produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	82.828.200
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			PERSENTASE KELUARGA YANG MELAKSANAKAN PRILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	333.797.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.910.498.098



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	505.735.900
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	262.168.200
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Cakupan Peserta KB Aktif		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	439.950.400
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	278.948.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase jumlah lembaga adat tingkat Pengembangan Kebudayaan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	196.500.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional			
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.040.777.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	361.482.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik		



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	619.441.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.796.319.826
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indeks pembangunan literasi Masyarakat		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.513.975.000
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Indeks pembangunan literasi Masyarakat		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	213.583.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	73.252.600
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			% SKPD menyampaikan RKA tepat waktu, % survey kepuasan Pelayanan, % SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan, % Laporan Keuangan Daerah disampaikan Tepat Waktu, % SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	992.862.200



3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Tabel 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian						

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Peningkatan pelayanan publik urusan pemerintah daerah			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	77.929.700	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
				Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	52.598.600	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.861.232.500	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Persentase Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.191.123.700	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	248.330.700	
				Persentase PPHI yang difasilitasi			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	248.330.700	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
				Persentase cadangan pangan masyarakat			
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	126.743.800	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Persentase cadangan pangan pemerintah daerah			
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	632.877.600	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				Persentase penurunan daerah rentan rawan pangan			
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	178.132.700	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan			
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	32.636.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				OCAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20.934.400	
				CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.164.233.350	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	72.167.600	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
				PERSENTASE KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39.046.400	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				OPERSENTASE USAHA MIKRO YANG LABANYA MENINGKAT			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	285.370.400	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTAMBAH			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	277.956.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				ONilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	635.719.000	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	10.787.100.263	

					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	109.514.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	82.437.400	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	58.443.600	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				0 Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	426.926.800	
				Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP0			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	426.926.800	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	87.980.800	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	106.140.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DISPORAPAR			
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	9.128.950.172	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan			
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	833.938.100	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase wira usaha muda			
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	833.938.100	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN			
				Persentase prestasi olah raga yang diraih			
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	8.368.756.300	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
				Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan dalam			
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	756.674.600	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
				Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Ikan			
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	227.482.500	
				Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Ikan (ton)			
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.513.863.200	
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
				Persentase Kawasan Perikanan Lestari			
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	137.346.200	
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
				Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan			
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	471.711.400	

					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	26.849.000	
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase peningkatan kunjungan wisata			
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	839.242.700	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Rata-rata lama kunjungan wisata			
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	910.448.500	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Persentase peningkatan SDM sektor pariwisata			
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	242.154.600	
				persentase produk kreasi unggulan			
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	242.154.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	22.219.999.974	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				

					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.574.440.500	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				

					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	21.909.887.700	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				

					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	736.005.700	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	757.118.350	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				

					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.392.884.900	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
				PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	57.010.000	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				PERSENTASE PENINGKATAN SAPRAS			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	949.088.500	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
				PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	114.664.100	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
				PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA SETELAH PROMOSI			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	467.513.800	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
				PERSENTASE ALAT – ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	210.812.300	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	210.812.300	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PRODUK YANG DIPASARKAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	46.210.000	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	196.141.800	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
				PERSENTASE PRODUK INDUSTRI YANG BERSERTIFIKAT HALAL			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	79.758.300	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				PROFIL IKM YANG BERKEMBANG			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	936.995.800	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Persentase warga transmigrasi yang terampil			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	111.352.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	198.477.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia						

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Peningkatan pelayanan publik urusan pemerintah daerah			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	254.460.077.343		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	41.053.819.136		

				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.435.700.077		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
				Persentase Kurikulum yang sesuai peraturan			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	115.951.000		
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				Persentase peningkatan angka jumlah guru PNS yang s1 (PAUD, SD dan SMP)			
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	731.300.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				

				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	73.020.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	126.810.019.832		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Angka Kematian Bayi (AKB)			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	63.016.331.193	
				Angka Kematian Ibu (AKI)			
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	63.016.331.193	
				Angka Kesakitan			
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	63.016.331.193	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	63.016.331.193	

					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.133.469.220	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sesuai Standar			
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.197.526.600	
				Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar			
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.197.526.600	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				JUMLAH PRODUKSI RUMAH TANGGA YANG MEMPUNYAI SERTIFIKAT KEAMANAN PANGAN (analisa sendiri)			
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	82.828.200	
				Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	82.828.200	
				Persentase sarana produksi U MOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan			
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	82.828.200	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				PERSENTASE KELUARGA YANG MELAKSANAKAN PRILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)			
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	333.797.600	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
				Persentase cadangan pangan masyarakat			
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	206.826.800	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
				Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	505.735.900	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
				Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	262.168.200	
				Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Cakupan Peserta KB Aktif			
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	439.950.400	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
				Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	278.948.500	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Persentase jumlah lembaga adat tingkat Pengembangan Kebudayaan			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	196.500.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.040.777.000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	361.482.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
				Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	619.441.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Akuntabilitas Kinerja			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.796.319.826	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Indeks pembangunan literasi Masyarakat			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.513.975.000	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
				Indeks pembangunan literasi Masyarakat			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	213.583.600	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	165.937.200	
3	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah						

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Sakip SKPD			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	16.563.516.167	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	28.967.320.100	
				"Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	28.967.320.100	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8.444.640.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	6.200.982.200	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	31.004.216.600	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
				Jumlah bangunan yang ditata			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	5.370.635.100	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase Jalan dalam kondisi mantap			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	98.267.570.000	
				Persentase Jembatan dalam kondisi baik			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	98.267.570.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUIK yang dibina			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.985.009.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.744.745.900	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	594.694.600	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.497.850.650	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.165.638.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	44.201.086.300	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
				Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	45.872.100	
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
				Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10.500.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				
				Persentase pengelolaan izin membuka tanah			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	183.004.900	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
				Persentase penatagunaan tanah			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	28.402.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	849.072.800	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	25.338.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)			
					DINAS PERHUBUNGAN	1.210.733.600	
				Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan			
					DINAS PERHUBUNGAN	472.939.000	
				Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan			
					DINAS PERHUBUNGAN	17.583.986.200	
				Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai			
					DINAS PERHUBUNGAN	51.533.000	
				Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek			
					DINAS PERHUBUNGAN	398.809.000	
				Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai			
					DINAS PERHUBUNGAN	90.610.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik			
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6.774.323.009	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6.774.323.009	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah			
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6.630.971.900	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	4.021.794.152	
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	4.021.794.152	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	214.436.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah			
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	28.634.800	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang tercatat, Tingkat validasi aset yang akan dimusnahkan, Persentase SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Daerah			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	238.774.800	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	104.220.000	
				Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	104.220.000	
4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang di susun setiap tahun			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	211.860.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	44.936.400	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.928.553.700	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
				Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di Kelola			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	67.145.700	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
				Persentase Pengawasan Rekomendasi Lingkungan yang di Terbitkan			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	84.479.700	
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
				Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Keraifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	20.186.500	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diterima masyarakat			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	108.957.000	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang tangani			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	39.040.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase Peningkatan Pengelolaan Persampahan			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6.185.535.400	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase Kebijakan di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Bidang Perekonomian, Bidang Sumberdaya Alam yang terlaksana dan berkualitas			
					SEKRETARIAT DAERAH	133.575.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor			
					KECAMATAN PARINGIN	188.988.750	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan			
					KECAMATAN PARINGIN	401.663.900	
5	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan						

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	9.713.413.550	
				Nilai akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) DISDUKCAPIL			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.769.494.538	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	278.343.900	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	213.426.800	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	174.481.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
				Persentase pengelolaan profil kependudukan			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.862.500	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	544.469.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku			
					DINAS PERHUBUNGAN	4.440.560.185	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					DINAS PERHUBUNGAN	5.634.186.605	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Indek Pengawasan Kearsipan			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	809.901.500	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Indek Pengawasan Kearsipan			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	427.470.300	
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				
				Indek Pengawasan Kearsipan			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	187.026.800	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				

					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	5.053.733.900	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					SEKRETARIAT DAERAH	16.001.354.468	
				Persentase Kebijakan di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana Serta Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang terlaksana dan berkualitas			
					SEKRETARIAT DAERAH	1.561.558.000	
				Persentase Kebijakan di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi yang terlaksana dan Berkualitas			
					SEKRETARIAT DAERAH	1.725.674.700	
				Persentase Kebijakan di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga yang terlaksana dan Berkualitas			
					SEKRETARIAT DAERAH	32.901.021.113	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan Administrasi Kewilayahan dan Otonomi dan Kerjasama Daerah yang Terlaksana dan Berkualitas			
					SEKRETARIAT DAERAH	850.970.300	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase Kebijakan di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Bidang Perekonomian, Bidang Sumberdaya Alam yang terlaksana dan berkualitas			
					SEKRETARIAT DAERAH	794.039.500	
				Persentase Kebijakan di Bidang Pengelolaan PBJ, Bidang Pengelolaan LPSE, Bidang Pembinaan dan Advokasi PBJ yang terlaksanan dan Berkualitas			
					SEKRETARIAT DAERAH	398.749.000	
				Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD			
					SEKRETARIAT DAERAH	589.490.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi			
					SEKRETARIAT DAERAH	589.490.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					SEKRETARIAT DPRD	316.755.000	
			Laporan				
					SEKRETARIAT DPRD	316.755.000	
			Laporan administrasi keuangan				
					SEKRETARIAT DPRD	3.477.135.296	
			Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian				
					SEKRETARIAT DPRD	17.063.752.480	
			Prosentase pemenuhan administrasi laporan keuangan				
					SEKRETARIAT DPRD	4.278.470.296	
			Prosentase Pemenuhan Administrasi Sarana dan Prasarana				
					SEKRETARIAT DPRD	8.419.389.550	
			Waktu Pelayanan Administrasi Keuangan				
					SEKRETARIAT DPRD	3.271.482.000	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
			PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH				
					SEKRETARIAT DPRD	250.151.800	
			PRESENTASE ASPIRASI MASYARAKAT YANG DAPAT DI AKOMODIR(DI BAHAS) OLEH DPRD				
					SEKRETARIAT DPRD	1.151.332.700	
			PRESENTASE KEGIATAN DPRD YANG TERPUBLIKASI DAN TERAKSES OLEH PUBLIK				
					SEKRETARIAT DPRD	7.249.805.300	
			PRESENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH				
					SEKRETARIAT DPRD	214.005.200	
			PRESENTASE RAPERDA YANG TELAH DIBAHAS OLEH DPRD DAN DISAMPAIKAN KE BAGIAN HUKUM				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					SEKRETARIAT DPRD	4.171.332.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan jasa administrasi keuangan			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.704.973.015	
				Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.774.774.050	
				Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.704.973.015	
				Nilai Predikat Akuntabilitas Kinerja			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	282.995.200	
				Pemeliharaan Barang Milik daerah			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	353.500.850	
				Pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	843.693.800	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	617.353.200	
				Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	960.226.200	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional, provinsi, kabupaten)			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.443.030.500	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (gakorpemerintahan & pembangunan manusia)			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.151.638.700	
				Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi & infrastruktur dengan nilai baik			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.077.655.000	
				Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan & pembangunan manusia dengan nilai baik			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.151.638.700	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	239.682.400	
				Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, Cakupan sarana kerja aparatur, Persentase tingkat Disiplin Aparatur, Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.933.361.460	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	289.710.000	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	896.689.000	
				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.574.175.200	
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	14.388.297.642	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	859.717.809	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	233.896.326.340	
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.010.347.300	
				% SKPD menyampaikan RKA tepat waktu, % survey kepuasan Pelayanan, % SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan, % Laporan Keuangan Daerah disampaikan Tepat Waktu, % SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.716.429.800	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.926.431.200	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang tercatat, Tingkat validasi aset yang akan dimusnahkan, Persentase SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Daerah			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.004.455.600	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB P-2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan Non PAD			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.311.126.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.432.832.040	
				Persentase Aset dalam Kondisi Baik			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.432.832.040	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.564.504.600	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.431.528.000	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Nilai predikat indeks inovasi daerah			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	318.520.800	
				Nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.680.667.100	
				Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.338.940.000	
				Persentase Penelitian dan Pengembangan daerah yang dimanfaatkan			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	660.247.900	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat			
					INSPEKTORAT	10.487.832.910	
				Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik			
					INSPEKTORAT	10.487.832.910	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan			
					INSPEKTORAT	3.374.460.000	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Indeks Integritas			
					INSPEKTORAT	794.032.400	
				Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM			
					INSPEKTORAT	794.032.400	
				Level kapabilitas APIP			
					INSPEKTORAT	794.032.400	
				Level Maturitas SPIP			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					INSPEKTORAT	794.032.400	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Akuntabilitas Kinerja			
					KECAMATAN LAMPIHONG	3.612.979.191	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)			
					KECAMATAN LAMPIHONG	154.470.700	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)			
					KECAMATAN LAMPIHONG	333.021.900	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD			
					KECAMATAN LAMPIHONG	144.527.900	
				Nilai / predikat LAKIP SKPD			
					KECAMATAN BATUMANDI	3.335.000	
				Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayanan			
					KECAMATAN BATUMANDI	118.030.900	
				Presentase ASN yang terpenuhi Hak keuangannya			
					KECAMATAN BATUMANDI	3.687.229.573	
				Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor			
					KECAMATAN BATUMANDI	96.895.000	
				Tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor			
					KECAMATAN BATUMANDI	433.436.250	
				Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor			
					KECAMATAN AWAYAN	98.293.000	
				Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor			
					KECAMATAN AWAYAN	613.321.800	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)			
					KECAMATAN HALONG	3.547.659.020	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				ONilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					KECAMATAN JUAI	131.516.400	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					KECAMATAN JUAI	3.161.664.491	
				Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi			
					KECAMATAN PARINGIN	13.996.000	
				Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya			
					KECAMATAN PARINGIN	5.042.868.533	
				Persentase Tingkat Disiplin Aparatus			
					KECAMATAN PARINGIN	12.753.000	
				Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor			
					KECAMATAN PARINGIN	1.047.911.000	
				Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu			
					KECAMATAN PARINGIN	12.753.000	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					KECAMATAN TEBING TINGGI	2.933.540.450	
				Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	23.443.300	
				Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan Yang Berlaku			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	4.201.135.370	
				Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	375.654.700	
				Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	322.518.700	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	2.727.100	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	145.247.800	

					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	48.859.400	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Nilai IKM			
					KECAMATAN LAMPIHONG	47.617.000	
				Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan			
					KECAMATAN BATUMANDI	12.518.300	
					KECAMATAN AWAYAN	103.532.500	
				Persentase PATEN yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan			
					KECAMATAN HALONG	138.256.400	
				Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan			
					KECAMATAN JUAI	77.438.100	
				Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor			
					KECAMATAN PARINGIN	88.328.000	
				Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan			
					KECAMATAN TEBING TINGGI	55.774.000	
				Persentase PATEN Yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	43.560.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
					KECAMATAN LAMPIHONG	329.823.000	
				Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
					KECAMATAN LAMPIHONG	60.524.300	
				Fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN BATUMANDI	273.101.400	

					KECAMATAN BATUMANDI	25.000.000	
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			
					KECAMATAN AWAYAN	309.472.000	
				Persentase Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Desa			
					KECAMATAN HALONG	321.500.000	

					KECAMATAN HALONG	25.000.000	
				Persentase fasilitas pelaksanaan musrenbang desa			
					KECAMATAN JUAI	349.937.900	
				Kesadaran Masyarakat dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni			
					KECAMATAN PARINGIN	68.118.000	
				Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan			
					KECAMATAN PARINGIN	1.858.614.900	
				Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
					KECAMATAN PARINGIN	229.307.200	
				Persentase fasilitas pelaksanaan musrenbang desa			
					KECAMATAN TEBING TINGGI	220.572.500	
				Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	1.189.181.000	
				Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	234.300.000	
				Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	61.312.500	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
					KECAMATAN LAMPIHONG	65.011.000	
				Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor			
					KECAMATAN BATUMANDI	7.167.400	
				Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Awayan			
					KECAMATAN AWAYAN	68.416.600	
				Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor			
					KECAMATAN HALONG	2.886.400	
				Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor			
					KECAMATAN JUAI	82.544.500	
				Jumlah Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan			
					KECAMATAN PARINGIN	22.025.200	
				Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor			
					KECAMATAN TEBING TINGGI	40.798.000	
				Persentase Koordinasi Penerapan dan Peneggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	26.620.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
					KECAMATAN LAMPIHONG	213.055.600	
				Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa			
					KECAMATAN BATUMANDI	256.419.300	
				Terselenggaranya urusan pemerintahan umum			
					KECAMATAN AWAYAN	235.634.000	
				Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa			
					KECAMATAN HALONG	166.921.800	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase desa tertib administrasi umum			
					KECAMATAN JUAI	247.950.400	
				Persentase Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal			
					KECAMATAN PARINGIN	249.900.100	
				Persentase desa tertib administrasi umum			
					KECAMATAN TEBING TINGGI	227.280.200	
				Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	114.129.100	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
					KECAMATAN LAMPIHONG	117.721.500	
				Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa			
					KECAMATAN BATUMANDI	93.895.000	
				Pesentase desa dengan administasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Awayan			
					KECAMATAN AWAYAN	156.028.200	
				Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa			
					KECAMATAN HALONG	160.580.800	
				Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa			
					KECAMATAN JUAI	163.236.300	
				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
					KECAMATAN PARINGIN	139.136.200	
				Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa			
					KECAMATAN TEBING TINGGI	140.572.200	
				Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					KECAMATAN PARINGIN SELATAN	92.470.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif						

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.547.041.103	
				Tingkat kelancaran pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	145.819.600	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.353.851.229	
				Persentase dan fasilitasi pemeliharaan barang milik Daerah			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	109.813.800	
				Persentase Fasilitasi Pengadaan barang milik Daerah			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	52.098.600	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.970.907.700	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.861.211.300	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.000.121.300	
				Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.113.564.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.488.045.430	
				Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	568.111.700	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	302.605.200	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	328.979.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.454.881.837	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	517.139.600	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
				Persentase makam yang terawat			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27.350.200	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	779.521.200	
				IPG (Indeks Pembangunan gender)			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	779.521.200	
				Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	779.521.200	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.588.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	105.536.300	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	59.362.400	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				IPA (Indeks Perlindungan Anak)			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	86.638.800	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	72.267.200	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
				Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.088.559.000	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.898.364.900	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.551.204.900	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.551.204.900	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Kebijakan di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga yang terlaksana dan Berkualitas			
					SEKRETARIAT DAERAH	400.000.000	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase Kebijakan di Bidang Perundang-undangan, Bidang Bantuan Hukum dan Bidang Dokumentasi dan Informasi yang terlaksana dan berkualitas			
					SEKRETARIAT DAERAH	341.727.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor			
					KECAMATAN AWAYAN	3.063.172.870	
				Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.452.940.734	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.632.775.600	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase Parpol Yang Aktif			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.628.925.300	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase Ormas yang aktif			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	284.845.100	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	124.156.400	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	611.378.000	



BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi berikut;

Tabel. 4.1

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	312.947.797.256	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	312.947.797.256	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	296.512.097.179	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	254.538.007.043	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201.933.200	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.267.200	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.666.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	244.379.330.843	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	241.685.505.443	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.693.825.400	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.240.755.000	
1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	144.330.000	
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	790.980.000	
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	305.445.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.307.694.000	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	116.640.000	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.191.054.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.610.654.800	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.305.800	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.174.400	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.932.300	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	454.303.300	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	51.452.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	915.487.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.922.000	
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	53.922.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	872.508.800	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	213.451.800	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	659.057.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	871.208.400	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	270.617.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.148.200	
1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	77.929.700	
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	222.513.500	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	41.053.819.136	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	17.190.633.797	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	950.000.000	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	850.000.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	397.900.000	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	145.420.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	626.336.900	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	13.168.350.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	132.703.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	719.563.897	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200.360.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.512.696.139	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	550.000.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	600.000.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	818.000.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	194.900.000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	101.540.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	456.070.000	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.600.300.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	69.593.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	122.293.139	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.316.010.200	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	400.000.000	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	300.000.000	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	42.500.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	251.305.600	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5.724.050.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.617.099.600	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	324.105.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.656.950.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.034.479.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	709.210.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.268.220.000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	64.349.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	992.700.000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	115.951.000	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	115.951.000	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3.930.000	
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3.930.000	
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	28.400.000	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	79.691.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	731.300.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	731.300.000	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	444.410.000	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	286.890.000	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	73.020.000	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	73.020.000	
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	73.020.000	
1.01.2.22.0.00.01.0001	SDN AMBAKIANG HULU	61.682.016	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.682.016	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	61.682.016	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	61.682.016	
1.01.2.22.0.00.01.0002	SDN BADALUNGGGA	32.214.119	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	32.214.119	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	32.214.119	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32.214.119	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.01.0003	SDN BADALUNGGA HILIR	22.053.142	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	22.053.142	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.053.142	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	22.053.142	
1.01.2.22.0.00.01.0004	SDN BARAMBAN	87.586.678	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	87.586.678	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	87.586.678	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	87.586.678	
1.01.2.22.0.00.01.0005	SDN BARU	22.919.500	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	22.919.500	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.919.500	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	22.919.500	
1.01.2.22.0.00.01.0006	SDN BAYUR	59.081.084	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	59.081.084	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	59.081.084	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	59.081.084	
1.01.2.22.0.00.01.0007	SDN BALANTI	23.879.452	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	23.879.452	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	23.879.452	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	23.879.452	
1.01.2.22.0.00.01.0008	SDN MANINGAU	54.268.302	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	54.268.302	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	54.268.302	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.268.302	
1.01.2.22.0.00.01.0009	SDN MERAH	124.386.899	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	124.386.899	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	124.386.899	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	124.386.899	
1.01.2.22.0.00.01.0010	SDN MUARA JAYA	49.892.992	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	49.892.992	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	49.892.992	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	49.892.992	
1.01.2.22.0.00.01.0011	SDN NUNGKA	60.965.902	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	60.965.902	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	60.965.902	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	60.965.902	
1.01.2.22.0.00.01.0012	SDN PEMATANG	53.045.764	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	53.045.764	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	53.045.764	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	53.045.764	
1.01.2.22.0.00.01.0013	SDN PIYAIT	18.467.794	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	18.467.794	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	18.467.794	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	18.467.794	
1.01.2.22.0.00.01.0014	SDN PULANTAN	41.471.689	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	41.471.689	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	41.471.689	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.471.689	
1.01.2.22.0.00.01.0015	SDN PULAU KAMBANG	53.380.334	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	53.380.334	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	53.380.334	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	53.380.334	
1.01.2.22.0.00.01.0016	SDN PUTAT BASIUN	74.664.528	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	74.664.528	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	74.664.528	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	74.664.528	
1.01.2.22.0.00.01.0017	SDN SUNGAI PUMPUNG	56.692.950	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.692.950	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	56.692.950	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	56.692.950	
1.01.2.22.0.00.01.0018	SDN TUNDAKAN	90.170.827	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	90.170.827	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	90.170.827	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90.170.827	
1.01.2.22.0.00.01.0019	SDN TUNDI	73.410.010	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	73.410.010	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	73.410.010	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	73.410.010	
1.01.2.22.0.00.01.0020	SDN UUNGAN	18.537.720	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	18.537.720	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	18.537.720	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	18.537.720	
1.01.2.22.0.00.01.0021	SDN WANGKILI	30.657.299	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	30.657.299	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	30.657.299	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.657.299	
1.01.2.22.0.00.01.0022	SDN BAKUNG	105.406.540	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	105.406.540	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	105.406.540	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	105.406.540	
1.01.2.22.0.00.01.0023	SDN BANUA HANYAR	110.985.148	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	110.985.148	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	110.985.148	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	110.985.148	
1.01.2.22.0.00.01.0024	SDN BUNGUR	153.389.242	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	153.389.242	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	153.389.242	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	153.389.242	
1.01.2.22.0.00.01.0025	SDN GUHA 1	65.272.735	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	65.272.735	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	65.272.735	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	65.272.735	
1.01.2.22.0.00.01.0026	SDN GUHA 2	68.257.074	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	68.257.074	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	68.257.074	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	68.257.074	
1.01.2.22.0.00.01.0027	SDN GUNUNG MANAU	24.501.246	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	24.501.246	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	24.501.246	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.501.246	
1.01.2.22.0.00.01.0028	SDN HAMPARAYA	31.849.514	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	31.849.514	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.849.514	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	31.849.514	
1.01.2.22.0.00.01.0029	SDN KARUH	98.266.006	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	98.266.006	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	98.266.006	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	98.266.006	
1.01.2.22.0.00.01.0030	SDN KASAI	56.770.187	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.770.187	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	56.770.187	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	56.770.187	
1.01.2.22.0.00.01.0031	SDN LOK BATU	82.011.926	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	82.011.926	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	82.011.926	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	82.011.926	
1.01.2.22.0.00.01.0032	SDN MAMPARI	65.852.615	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	65.852.615	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	65.852.615	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	65.852.615	
1.01.2.22.0.00.01.0033	SDN MANTIMIN 1	93.707.785	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	93.707.785	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	93.707.785	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	93.707.785	
1.01.2.22.0.00.01.0034	SDN MANTIMIN 2	42.789.494	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	42.789.494	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	42.789.494	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	42.789.494	
1.01.2.22.0.00.01.0035	SDN MUNJUNG	96.390.254	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	96.390.254	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	96.390.254	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	96.390.254	
1.01.2.22.0.00.01.0036	SDN PELAJAU	109.136.642	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	109.136.642	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	109.136.642	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	109.136.642	
1.01.2.22.0.00.01.0037	SDN RIWA	41.630.884	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	41.630.884	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	41.630.884	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.630.884	
1.01.2.22.0.00.01.0038	SDN SUMPUNG	90.818.016	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	90.818.016	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	90.818.016	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90.818.016	
1.01.2.22.0.00.01.0039	SDN SUNGAI HANYAR	76.340.961	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	76.340.961	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	76.340.961	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	76.340.961	
1.01.2.22.0.00.01.0040	SDN SUNGAI KUSI	46.828.425	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	46.828.425	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	46.828.425	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46.828.425	
1.01.2.22.0.00.01.0041	SDN TELUK MASJID 1	84.383.381	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	84.383.381	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	84.383.381	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	84.383.381	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.01.0042	SDN TELUK MASJID 2	4.031.186	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4.031.186	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4.031.186	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.031.186	
1.01.2.22.0.00.01.0043	SDN TIMBUN TULANG	31.618.013	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	31.618.013	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.618.013	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	31.618.013	
1.01.2.22.0.00.01.0045	SDK AMBATA	6.513.400	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	6.513.400	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6.513.400	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	6.513.400	
1.01.2.22.0.00.01.0046	SDK AMBATUNIN	22.921.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	22.921.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.921.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	22.921.000	
1.01.2.22.0.00.01.0047	SDK AMPINANG	32.070.822	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	32.070.822	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	32.070.822	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32.070.822	
1.01.2.22.0.00.01.0048	SDK ANDAMAI	9.741.948	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	9.741.948	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	9.741.948	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	9.741.948	
1.01.2.22.0.00.01.0049	SDK HAMPANG	29.480.190	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	29.480.190	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	29.480.190	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29.480.190	
1.01.2.22.0.00.01.0050	SDK KURIHAI	8.585.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	8.585.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	8.585.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	8.585.000	
1.01.2.22.0.00.01.0051	SDK LIBARU SUNGKAI	56.465.007	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.465.007	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	56.465.007	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	56.465.007	
1.01.2.22.0.00.01.0052	SDK MABULAN	9.690.395	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	9.690.395	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	9.690.395	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	9.690.395	
1.01.2.22.0.00.01.0053	SDK MAPAT	64.708.007	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	64.708.007	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	64.708.007	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	64.708.007	
1.01.2.22.0.00.01.0054	SDK SAWANG	33.197.562	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	33.197.562	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.197.562	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	33.197.562	
1.01.2.22.0.00.01.0055	SDK SISIRIN	15.772.325	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.772.325	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	15.772.325	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.772.325	
1.01.2.22.0.00.01.0056	SDK TAMPAAN	27.278.200	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	27.278.200	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	27.278.200	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	27.278.200	
1.01.2.22.0.00.01.0057	SDK TANJUNGAN JELAMU	14.160.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	14.160.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	14.160.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	14.160.000	
1.01.2.22.0.00.01.0058	SDK TINGGAR	39.924.064	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	39.924.064	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	39.924.064	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.924.064	
1.01.2.22.0.00.01.0059	SDN ANIYUNGAN	14.615.089	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	14.615.089	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	14.615.089	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	14.615.089	
1.01.2.22.0.00.01.0060	SDN BARUH PANYAMBARAN 1	212.104.990	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	212.104.990	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	212.104.990	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	212.104.990	
1.01.2.22.0.00.01.0061	SDN BARUH PANYAMBARAN 2	56.496.035	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.496.035	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	56.496.035	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	56.496.035	
1.01.2.22.0.00.01.0062	SDN BINJAI PUNGAL 1	59.551.367	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	59.551.367	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	59.551.367	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	59.551.367	
1.01.2.22.0.00.01.0063	SDN BINJAI PUNGAL 2	94.564.046	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	94.564.046	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	94.564.046	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	94.564.046	
1.01.2.22.0.00.01.0064	SDN BINJU	54.802.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	54.802.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	54.802.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.802.000	
1.01.2.22.0.00.01.0065	SDN BINUANG SANTANG	57.066.223	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	57.066.223	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	57.066.223	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	57.066.223	
1.01.2.22.0.00.01.0066	SDN GUNUNG RIUT 1	28.365.144	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	28.365.144	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.365.144	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	28.365.144	
1.01.2.22.0.00.01.0067	SDN GUNUNG RIUT 2	40.353.081	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.353.081	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	40.353.081	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.353.081	
1.01.2.22.0.00.01.0068	SDN HALONG 1	110.233.805	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	110.233.805	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	110.233.805	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	110.233.805	
1.01.2.22.0.00.01.0069	SDN HALONG 2	68.666.835	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	68.666.835	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	68.666.835	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	68.666.835	
1.01.2.22.0.00.01.0070	SDN HALONG 3	131.659.476	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	131.659.476	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	131.659.476	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	131.659.476	
1.01.2.22.0.00.01.0071	SDN HAUWAI 1	83.268.351	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	83.268.351	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	83.268.351	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.268.351	
1.01.2.22.0.00.01.0072	SDN HAUWAI 2	82.033.137	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	82.033.137	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	82.033.137	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	82.033.137	
1.01.2.22.0.00.01.0073	SDN KAPUL	82.019.928	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	82.019.928	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	82.019.928	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	82.019.928	
1.01.2.22.0.00.01.0074	SDN MAMANTANG	19.253.869	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	19.253.869	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	19.253.869	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.253.869	
1.01.2.22.0.00.01.0075	SDN MANTUYAN	62.192.365	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	62.192.365	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	62.192.365	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	62.192.365	
1.01.2.22.0.00.01.0076	SDN MAUYA	89.864.046	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	89.864.046	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	89.864.046	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	89.864.046	
1.01.2.22.0.00.01.0077	SDN PUYUN	108.916.023	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	108.916.023	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	108.916.023	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	108.916.023	
1.01.2.22.0.00.01.0078	SDN TABUAN 1	35.150.829	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	35.150.829	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	35.150.829	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	35.150.829	
1.01.2.22.0.00.01.0079	SDN TABUAN 2	95.082.451	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	95.082.451	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	95.082.451	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	95.082.451	
1.01.2.22.0.00.01.0080	SDN UREN 1	72.869.588	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	72.869.588	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	72.869.588	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	72.869.588	
1.01.2.22.0.00.01.0081	SDN BATA	39.049.951	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	39.049.951	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	39.049.951	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.049.951	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.01.0082	SDN BUNTU KARAU 1	75.985.498	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	75.985.498	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	75.985.498	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	75.985.498	
1.01.2.22.0.00.01.0083	SDN GELUMBANG	105.102.480	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	105.102.480	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	105.102.480	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	105.102.480	
1.01.2.22.0.00.01.0084	SDN GULINGGANG	26.308.183	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	26.308.183	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26.308.183	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	26.308.183	
1.01.2.22.0.00.01.0085	SDN HAMARUNG 1	40.495.163	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.495.163	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	40.495.163	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.495.163	
1.01.2.22.0.00.01.0086	SDN HAMARUNG 2	184.628.291	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	184.628.291	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	184.628.291	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	184.628.291	
1.01.2.22.0.00.01.0087	SDN HUKAI	33.946.724	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	33.946.724	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.946.724	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	33.946.724	
1.01.2.22.0.00.01.0088	SDN JUAI	121.634.753	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	121.634.753	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	121.634.753	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	121.634.753	
1.01.2.22.0.00.01.0089	SDN LALAYAU 1	81.724.769	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	81.724.769	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	81.724.769	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	81.724.769	
1.01.2.22.0.00.01.0090	SDN LALAYAU 2	33.850.161	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	33.850.161	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.850.161	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	33.850.161	
1.01.2.22.0.00.01.0091	SDN MARIAS	36.106.315	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	36.106.315	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	36.106.315	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	36.106.315	
1.01.2.22.0.00.01.0092	SDN MIHU 1	77.202.774	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	77.202.774	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	77.202.774	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	77.202.774	
1.01.2.22.0.00.01.0093	SDN MIHU 2	67.921.015	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	67.921.015	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	67.921.015	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	67.921.015	
1.01.2.22.0.00.01.0094	SDN MUARA NINIAN	68.546.744	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	68.546.744	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	68.546.744	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	68.546.744	
1.01.2.22.0.00.01.0095	SDN MUNGKUR UYAM	117.964.402	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	117.964.402	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	117.964.402	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	117.964.402	
1.01.2.22.0.00.01.0096	SDN PAMURUS	48.025.822	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48.025.822	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	48.025.822	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	48.025.822	
1.01.2.22.0.00.01.0097	SDN SIRAP 1	85.125.753	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	85.125.753	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	85.125.753	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	85.125.753	
1.01.2.22.0.00.01.0098	SDN SUNGAI BATUNG	49.197.454	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	49.197.454	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	49.197.454	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	49.197.454	
1.01.2.22.0.00.01.0099	SDN TAWAHAN 1	40.509.435	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.509.435	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	40.509.435	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.509.435	
1.01.2.22.0.00.01.0100	SDN TELUK BAYUR 2	97.564.204	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	97.564.204	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	97.564.204	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	97.564.204	
1.01.2.22.0.00.01.0101	SDN TELUK BAYUR 3	83.864.907	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	83.864.907	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	83.864.907	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.864.907	
1.01.2.22.0.00.01.0102	SDN TIGARUN	63.727.898	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	63.727.898	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	63.727.898	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	63.727.898	
1.01.2.22.0.00.01.0103	SDN BATU MERAH 1	262.258.334	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	262.258.334	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	262.258.334	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	262.258.334	
1.01.2.22.0.00.01.0104	SDN BATU MERAH 3	69.623.117	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	69.623.117	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	69.623.117	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	69.623.117	
1.01.2.22.0.00.01.0105	SDN HILIR PASAR	84.456.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	84.456.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	84.456.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	84.456.000	
1.01.2.22.0.00.01.0106	SDN JIMAMUN	184.832.526	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	184.832.526	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	184.832.526	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	184.832.526	
1.01.2.22.0.00.01.0107	SDN JUNGKAL	58.701.894	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	58.701.894	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	58.701.894	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	58.701.894	
1.01.2.22.0.00.01.0108	SDN KANDANG JAYA	61.390.953	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.390.953	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	61.390.953	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	61.390.953	
1.01.2.22.0.00.01.0109	SDN KUPANG	35.018.694	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	35.018.694	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	35.018.694	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	35.018.694	
1.01.2.22.0.00.01.0110	SDN KUSAMBI HILIR	48.297.846	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48.297.846	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	48.297.846	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	48.297.846	
1.01.2.22.0.00.01.0111	SDN KUSAMBI HULU 1	44.710.031	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	44.710.031	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	44.710.031	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	44.710.031	
1.01.2.22.0.00.01.0112	SDN KUSAMBI HULU 2	15.114.970	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.114.970	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	15.114.970	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.114.970	
1.01.2.22.0.00.01.0113	SDN LAJAR	100.560.653	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100.560.653	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100.560.653	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100.560.653	
1.01.2.22.0.00.01.0114	SDN LAMPIHONG KANAN	42.897.155	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	42.897.155	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	42.897.155	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	42.897.155	
1.01.2.22.0.00.01.0115	SDN LAMPIHONG KIRI	11.348.738	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	11.348.738	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	11.348.738	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	11.348.738	
1.01.2.22.0.00.01.0116	SDN LOK HAMA WANG	39.587.728	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	39.587.728	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	39.587.728	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.587.728	
1.01.2.22.0.00.01.0117	SDN LOK PANGINANGAN	62.885.897	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	62.885.897	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	62.885.897	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	62.885.897	
1.01.2.22.0.00.01.0118	SDN MATANG HANAU	61.671.958	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.671.958	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	61.671.958	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	61.671.958	
1.01.2.22.0.00.01.0119	SDN MUNDAR	64.765.003	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	64.765.003	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	64.765.003	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	64.765.003	
1.01.2.22.0.00.01.0120	SDN PANAITAN	58.352.926	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	58.352.926	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	58.352.926	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	58.352.926	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.01.0121	SDN PIMPING	71.762.215	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.762.215	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	71.762.215	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	71.762.215	
1.01.2.22.0.00.01.0122	SDN PUPUYUAN	13.590.638	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	13.590.638	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	13.590.638	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.590.638	
1.01.2.22.0.00.01.0123	SDN SIMPANG TIGA	45.850.930	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	45.850.930	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	45.850.930	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	45.850.930	
1.01.2.22.0.00.01.0124	SDN SUNGAI TABUK	44.992.699	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	44.992.699	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	44.992.699	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	44.992.699	
1.01.2.22.0.00.01.0125	SDN TAMPANG	61.890.781	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.890.781	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	61.890.781	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	61.890.781	
1.01.2.22.0.00.01.0126	SDN TANAH HABANG KANAN 1	25.081.640	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	25.081.640	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	25.081.640	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25.081.640	
1.01.2.22.0.00.01.0127	SDN TANAH HABANG KANAN 2	41.348.507	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	41.348.507	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	41.348.507	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.348.507	
1.01.2.22.0.00.01.0128	SDN TANAH HABANG KIRI	24.705.409	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	24.705.409	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	24.705.409	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.705.409	
1.01.2.22.0.00.01.0129	SDN BALIDA	82.720.948	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	82.720.948	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	82.720.948	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	82.720.948	
1.01.2.22.0.00.01.0130	SDN DAHAI	262.778.771	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	262.778.771	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	262.778.771	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	262.778.771	
1.01.2.22.0.00.01.0131	SDN DANAU BANTA	52.363.881	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	52.363.881	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	52.363.881	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	52.363.881	
1.01.2.22.0.00.01.0132	SDN GUNUNG PANDAU	115.892.391	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	115.892.391	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	115.892.391	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	115.892.391	
1.01.2.22.0.00.01.0133	SDN HUJAN AMAS 1	177.029.845	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	177.029.845	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	177.029.845	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	177.029.845	
1.01.2.22.0.00.01.0134	SDN HUJAN AMAS 2	41.884.756	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	41.884.756	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	41.884.756	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.884.756	
1.01.2.22.0.00.01.0135	SDN KALAHANG	49.639.390	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	49.639.390	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	49.639.390	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	49.639.390	
1.01.2.22.0.00.01.0136	SDN LASUNG BATU 1	95.040.472	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	95.040.472	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	95.040.472	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	95.040.472	
1.01.2.22.0.00.01.0137	SDN LASUNG BATU 2	153.244.594	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	153.244.594	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	153.244.594	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	153.244.594	
1.01.2.22.0.00.01.0138	SDN LOK BATUNG	48.070.207	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48.070.207	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	48.070.207	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	48.070.207	
1.01.2.22.0.00.01.0139	SDN MALIHU	38.795.295	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	38.795.295	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	38.795.295	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	38.795.295	
1.01.2.22.0.00.01.0140	SDN MANGKAYAHU	46.706.800	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	46.706.800	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	46.706.800	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46.706.800	
1.01.2.22.0.00.01.0141	SDN MURUNG ILUNG	56.015.559	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.015.559	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	56.015.559	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	56.015.559	
1.01.2.22.0.00.01.0142	SDN PARINGIN 1	317.353.988	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	317.353.988	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	317.353.988	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	317.353.988	
1.01.2.22.0.00.01.0143	SDN PARINGIN 2	269.775.724	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	269.775.724	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	269.775.724	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	269.775.724	
1.01.2.22.0.00.01.0144	SDN PARINGIN TIMUR	133.273.289	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	133.273.289	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	133.273.289	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	133.273.289	
1.01.2.22.0.00.01.0145	SDN SUNGAI KETAPI	76.128.343	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	76.128.343	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	76.128.343	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	76.128.343	
1.01.2.22.0.00.01.0146	SDN BARUH BAHINU DALAM	46.993.803	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	46.993.803	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	46.993.803	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46.993.803	
1.01.2.22.0.00.01.0147	SDN BARUH BAHINU LUAR	39.915.543	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	39.915.543	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	39.915.543	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.915.543	
1.01.2.22.0.00.01.0148	SDN BATU PIRING	396.474.095	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	396.474.095	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	396.474.095	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	396.474.095	
1.01.2.22.0.00.01.0149	SDN GALUMBANG	78.063.300	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	78.063.300	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	78.063.300	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	78.063.300	
1.01.2.22.0.00.01.0150	SDN GAMPA	75.728.393	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	75.728.393	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	75.728.393	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	75.728.393	
1.01.2.22.0.00.01.0151	SDN HALUBAU	52.217.433	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	52.217.433	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	52.217.433	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	52.217.433	
1.01.2.22.0.00.01.0152	SDN HALUBAU UTARA	51.556.599	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	51.556.599	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	51.556.599	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	51.556.599	
1.01.2.22.0.00.01.0153	SDN INAN	95.931.657	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	95.931.657	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	95.931.657	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	95.931.657	
1.01.2.22.0.00.01.0154	SDN KALADAN	81.837.814	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	81.837.814	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	81.837.814	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	81.837.814	
1.01.2.22.0.00.01.0155	SDN LINGSIR	77.697.600	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	77.697.600	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	77.697.600	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	77.697.600	
1.01.2.22.0.00.01.0156	SDN MARADAP	63.029.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	63.029.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	63.029.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	63.029.000	
1.01.2.22.0.00.01.0157	SDN MUARA PITAP	85.892.347	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	85.892.347	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	85.892.347	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	85.892.347	
1.01.2.22.0.00.01.0158	SDN MURUNG ABUIN	39.530.150	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	39.530.150	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	39.530.150	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.530.150	
1.01.2.22.0.00.01.0159	SDN PARINGIN SELATAN 1	363.112.628	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	363.112.628	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	363.112.628	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	363.112.628	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.01.0160	SDN TARANGAN	21.743.343	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	21.743.343	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21.743.343	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	21.743.343	
1.01.2.22.0.00.01.0161	SDN TELAGA PURUN	110.540.218	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	110.540.218	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	110.540.218	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	110.540.218	
1.01.2.22.0.00.01.0162	SDK RANTAU PAKU	22.018.795	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	22.018.795	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.018.795	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	22.018.795	
1.01.2.22.0.00.01.0163	SDK RARANUM	2.975.741	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.975.741	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2.975.741	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.975.741	
1.01.2.22.0.00.01.0164	SDK SIMPANG BUMBUAN	62.325.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	62.325.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	62.325.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	62.325.000	
1.01.2.22.0.00.01.0165	SDN AJUNG	62.093.227	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	62.093.227	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	62.093.227	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	62.093.227	
1.01.2.22.0.00.01.0166	SDN AUH	100.871.890	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100.871.890	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100.871.890	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100.871.890	
1.01.2.22.0.00.01.0167	SDN DAYAK PITAP	21.338.617	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	21.338.617	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21.338.617	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	21.338.617	
1.01.2.22.0.00.01.0168	SDN JUUH	114.472.695	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	114.472.695	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	114.472.695	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	114.472.695	
1.01.2.22.0.00.01.0169	SDN KAMBIYAIN	56.643.802	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.643.802	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	56.643.802	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	56.643.802	
1.01.2.22.0.00.01.0170	SDN LANGKAP	30.130.645	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	30.130.645	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	30.130.645	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.130.645	
1.01.2.22.0.00.01.0171	SDN MAYANAU	81.162.093	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	81.162.093	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	81.162.093	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	81.162.093	
1.01.2.22.0.00.01.0172	SDN PANIKIN	20.330.823	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	20.330.823	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	20.330.823	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20.330.823	
1.01.2.22.0.00.01.0173	SDN SUNGSUM	217.565.911	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	217.565.911	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	217.565.911	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	217.565.911	
1.01.2.22.0.00.01.0174	SDN TEBING TINGGI	124.409.746	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	124.409.746	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	124.409.746	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	124.409.746	
1.01.2.22.0.00.01.0177	SMPN 1 BATUMANDI	244.335.512	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	244.335.512	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	244.335.512	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	244.335.512	
1.01.2.22.0.00.01.0178	SMPN 2 BATUMANDI	56.458.550	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.458.550	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56.458.550	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	56.458.550	
1.01.2.22.0.00.01.0179	SMPN 3 BATUMANDI	97.892.120	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	97.892.120	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	97.892.120	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	97.892.120	
1.01.2.22.0.00.01.0180	SMPN 4 BATUMANDI	92.511.202	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	92.511.202	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	92.511.202	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	92.511.202	
1.01.2.22.0.00.01.0181	SMP SATU ATAP LIBARU SUNKAI	101.015.350	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	101.015.350	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	101.015.350	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	101.015.350	
1.01.2.22.0.00.01.0182	SMPN 1 HALONG	185.589.655	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	185.589.655	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	185.589.655	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	185.589.655	
1.01.2.22.0.00.01.0183	SMPN 2 HALONG	51.090.006	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	51.090.006	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	51.090.006	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	51.090.006	
1.01.2.22.0.00.01.0184	SMPN 3 HALONG	189.989.377	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	189.989.377	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	189.989.377	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	189.989.377	
1.01.2.22.0.00.01.0185	SMPN 4 HALONG	74.714.094	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	74.714.094	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	74.714.094	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	74.714.094	
1.01.2.22.0.00.01.0186	SMPN 5 HALONG	137.852.352	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	137.852.352	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	137.852.352	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	137.852.352	
1.01.2.22.0.00.01.0187	SMPN 6 HALONG	43.465.497	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	43.465.497	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	43.465.497	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Pertama		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	43.465.497	
1.01.2.22.0.00.01.0188	SMPN 1 JUAI	193.054.787	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	193.054.787	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	193.054.787	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	193.054.787	
1.01.2.22.0.00.01.0189	SMPN 2 JUAI	36.938.796	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	36.938.796	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	36.938.796	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	36.938.796	
1.01.2.22.0.00.01.0190	SMPN 1 LAMPIHONG	98.884.292	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	98.884.292	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	98.884.292	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	98.884.292	
1.01.2.22.0.00.01.0191	SMPN 2 LAMPIHONG	75.270.098	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	75.270.098	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	75.270.098	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75.270.098	
1.01.2.22.0.00.01.0192	SMPN 3 PARINGIN	81.755.985	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	81.755.985	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	81.755.985	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	81.755.985	
1.01.2.22.0.00.01.0193	SMPN 5 PARINGIN	64.705.711	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	64.705.711	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	64.705.711	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	64.705.711	
1.01.2.22.0.00.01.0195	SMPN 1 PARINGIN	514.991.651	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	514.991.651	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	514.991.651	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	514.991.651	
1.01.2.22.0.00.01.0196	SMPN 2 PARINGIN	51.581.634	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	51.581.634	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	51.581.634	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	51.581.634	
1.01.2.22.0.00.01.0197	SMPN 4 PARINGIN	233.214.291	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	233.214.291	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	233.214.291	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	233.214.291	
1.01.2.22.0.00.01.0198	SMPN 2 AWAYAN	264.459.984	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	264.459.984	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	264.459.984	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	264.459.984	
1.01.2.22.0.00.01.0199	SMPN 3 AWAYAN	63.439.237	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	63.439.237	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	63.439.237	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	63.439.237	
1.01.2.22.0.00.01.0201	SMPN 1 AWAYAN	112.399.444	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	112.399.444	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.399.444	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	112.399.444	
1.01.2.22.0.00.01.0202	SMPN 4 AWAYAN	200.790.480	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	200.790.480	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200.790.480	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.790.480	
1.01.2.22.0.00.01.0210	KB PEMBINA PARINGIN	7.930.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	7.930.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.930.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.930.000	
1.01.2.22.0.00.01.0240	KB PEMBINA PARINGIN SELATAN	9.150.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	9.150.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.150.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.150.000	
1.01.2.22.0.00.01.0246	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA PARINGIN SELATAN	34.770.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	34.770.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34.770.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	34.770.000	
1.01.2.22.0.00.01.0272	KB PEMBINA AWAYAN	6.100.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	6.100.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.100.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.100.000	
1.01.2.22.0.00.01.0281	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA AWAYAN	26.230.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	26.230.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	26.230.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	26.230.000	
1.01.2.22.0.00.01.0282	TK NEGERI AL AZKIYA	9.760.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	9.760.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.760.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.760.000	
1.01.2.22.0.00.01.0298	KB PEMBINA TEBING TINGGI	9.760.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	9.760.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.760.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.760.000	
1.01.2.22.0.00.01.0302	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA TEBING TINGGI	9.150.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	9.150.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.150.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.150.000	
1.01.2.22.0.00.01.0317	KB PEMBINA BATUMANDI	9.760.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	9.760.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.760.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.760.000	
1.01.2.22.0.00.01.0334	TK NEGERI PERTIWI RANTING	20.740.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	20.740.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20.740.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	20.740.000	
1.01.2.22.0.00.01.0359	TK NEGERI DAHLIA	7.930.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	7.930.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.930.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.930.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.01.0364	TK NEGERI MAWAR	18.910.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	18.910.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	18.910.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	18.910.000	
1.01.2.22.0.00.01.0367	TK NEGERI MUNDAR	17.080.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	17.080.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	17.080.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.080.000	
1.01.2.22.0.00.01.0368	TK NEGERI MUTIARA	40.870.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.870.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	40.870.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	40.870.000	
1.01.2.22.0.00.01.0369	TK NEGERI NUSA INDAH	20.740.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	20.740.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20.740.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	20.740.000	
1.01.2.22.0.00.01.0379	TK NEGERI TUNAS HARAPAN	21.350.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	21.350.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	21.350.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	21.350.000	
1.01.2.22.0.00.01.0385	KB PEMBINA JUAI	4.880.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4.880.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.880.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.880.000	
1.01.2.22.0.00.01.0396	TK NEGERI KARTINI	27.450.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	27.450.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	27.450.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	27.450.000	
1.01.2.22.0.00.01.0402	TK NEGERI PEMBINA JUAI	25.620.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	25.620.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	25.620.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	25.620.000	
1.01.2.22.0.00.01.0436	TK NEGERI PERTIWI RANTING	38.430.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	38.430.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	38.430.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	38.430.000	
1.01.2.22.0.00.01.0438	TK NEGERI TERATAI	17.690.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	17.690.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	17.690.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.690.000	
1.01.2.22.0.00.01.0442	SKB BALANGAN	238.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	238.200.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	238.200.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	238.200.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	204.573.972.645	
1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	204.573.972.645	
1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	137.838.056.125	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.810.019.832	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	433.863.400	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.038.400	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	133.825.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78.040.755.852	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77.778.170.352	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	262.585.500	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	488.800.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	488.800.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.312.396.500	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.690.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	661.800.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.387.500	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.899.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	580.620.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.394.380	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87.920.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.195.680	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.278.700	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.033.809.700	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.555.500	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	630.826.800	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.427.400	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.413.883.893	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.239.478.243	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.315.000.000	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.225.450.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.622.743.193	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	494.707.550	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	386.638.700	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60.600.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	77.541.600	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	56.797.200	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.287.870.850	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	476.082.200	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99.594.400	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	114.729.700	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	151.225.800	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	75.085.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	171.973.800	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	163.842.800	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	95.319.700	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	90.719.700	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	129.190.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Gangguan Jiwa Berat		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	232.007.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	207.909.600	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	140.528.250	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	729.671.700	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	48.868.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	273.683.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	317.729.600	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.095.692.800	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	155.013.700	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	33.247.789.400	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	24.630.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	86.970.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.091.344.700	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	68.270.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	747.900.000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	747.900.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	138.634.800	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	138.634.800	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.197.526.600	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.738.876.600	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	6.738.876.600	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	458.650.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	458.650.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN	82.828.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	DAN MAKANAN MINUMAN		
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	82.828.200	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	82.828.200	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	333.797.600	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	185.348.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	185.348.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	148.449.600	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	148.449.600	
1.02.2.14.0.00.01.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN	59.602.447.300	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.000.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	45.000.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	45.000.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.602.447.300	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.602.447.300	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	14.602.447.300	
1.02.2.14.0.00.01.0002	PUSKESMAS PARINGIN	776.658.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	776.658.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	776.658.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	776.658.000	
1.02.2.14.0.00.01.0003	PUSKESMAS PARINGIN SELATAN	672.265.200	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	672.265.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	MASYARAKAT		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	672.265.200	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	672.265.200	
1.02.2.14.0.00.01.0004	PUSKESMAS AWAYAN	884.776.100	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	884.776.100	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	884.776.100	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	884.776.100	
1.02.2.14.0.00.01.0005	PUSKESMAS TEBING TINGGI	400.860.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	400.860.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.860.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	400.860.000	
1.02.2.14.0.00.01.0006	PUSKESMAS LOKBATU	284.965.200	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	284.965.200	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	284.965.200	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	284.965.200	
1.02.2.14.0.00.01.0007	PUSKESMAS BATUMANDI	652.436.400	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	652.436.400	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	652.436.400	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	652.436.400	
1.02.2.14.0.00.01.0008	PUSKESMAS TANAH HABANG	246.673.200	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	246.673.200	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	246.673.200	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	246.673.200	
1.02.2.14.0.00.01.0009	PUSKESMAS LAMPIHONG	892.269.400	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	892.269.400	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	892.269.400	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	892.269.400	
1.02.2.14.0.00.01.0010	PUSKESMAS JUAI	904.320.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	904.320.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	904.320.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	904.320.000	
1.02.2.14.0.00.01.0011	PUSKESMAS PIRSUS	119.064.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	119.064.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119.064.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	119.064.000	
1.02.2.14.0.00.01.0012	PUSKESMAS HALONG	1.003.383.720	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.003.383.720	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.003.383.720	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.003.383.720	
1.02.2.14.0.00.01.0013	PUSKESMAS UREN	295.798.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	295.798.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	295.798.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	295.798.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200.548.635.067	
1.03.1.04.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	200.548.635.067	
1.03.1.04.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	200.548.635.067	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	16.563.516.167	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.640.000	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.750.000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.890.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.187.461.867	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.059.476.951	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.174.916	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	108.810.000	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	574.149.000	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68.250.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	505.899.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.941.642.500	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.304.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.560.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500.558.500	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.400.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.035.820.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.906.362.100	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	678.000.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.228.362.100	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.849.260.700	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.777.450	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.467.500	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.056.015.750	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	28.967.320.100	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.457.765.100	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.424.440.000	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	15.633.794.300	
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.122.890.000	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	276.640.800	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.509.555.000	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.751.080.000	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.959.620.000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.798.855.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.444.640.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.444.640.000	
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	8.444.640.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.200.982.200	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.200.982.200	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.896.460.000	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	304.522.200	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	31.004.216.600	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	31.004.216.600	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	19.826.728.200	
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	439.896.400	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10.737.592.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN	5.370.635.100	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	LINGKUNGANNYA		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5.370.635.100	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	5.370.635.100	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	98.267.570.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	98.267.570.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	79.615.226.500	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	4.270.640.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	840.766.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	7.743.570.000	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	5.444.960.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	352.407.500	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.985.009.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	174.180.000	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	174.180.000	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	140.069.000	
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	140.069.000	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	3.670.760.000	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	3.670.760.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.744.745.900	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	752.428.100	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	752.428.100	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	419.557.800	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	419.557.800	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	572.760.000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	572.760.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	51.459.269.550	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.1.04.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	51.459.269.550	
1.03.1.04.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	51.459.269.550	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	594.694.600	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	225.949.000	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	225.949.000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	368.745.600	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	193.156.000	
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	175.589.600	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.497.850.650	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	620.320.400	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	620.320.400	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.877.530.250	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	2.877.530.250	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.165.638.000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.165.638.000	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.165.638.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	44.201.086.300	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	44.201.086.300	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	362.520.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	43.838.566.300	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	24.062.395.732	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.667.636.803	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.667.636.803	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.692.860.703	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.819.600	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.339.600	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.480.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.475.370.155	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.418.570.155	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	46.800.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	317.378.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	272.378.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	486.803.100	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.275.100	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	222.978.900	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.045.300	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.995.200	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.508.600	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	224.845.300	
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.845.300	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.365.260	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	193.383.600	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.795.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.186.660	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623.279.288	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	298.628.488	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	168.680.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.970.800	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.861.211.300	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	841.990.000	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	109.450.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	732.540.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.428.321.300	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	446.771.500	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	62.713.200	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	523.585.400	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.248.046.600	
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	147.204.600	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	590.900.000	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	91.100.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	499.800.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.113.564.800	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000.121.300	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000.121.300	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	113.443.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	113.443.500	
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.394.758.929	
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.394.758.929	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.353.851.229	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.838.400	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.187.200	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.671.200	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.980.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.769.424.429	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.769.424.429	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	577.564.600	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	507.514.600	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.050.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	351.607.700	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.880.600	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.547.100	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.580.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.600.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.098.600	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.098.600	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.813.800	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.813.800	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.503.700	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	337.803.700	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.700.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.040.907.700	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.572.347.700	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.186.894.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	315.453.700	
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	70.000.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	468.560.000	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	56.340.000	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	412.220.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	18.687.112.967	
1.06.2.08.2.13.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.687.112.967	
1.06.2.08.2.13.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.687.112.967	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.056.157.130	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.917.800	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.440.000	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.477.800	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.939.473.098	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.853.953.098	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56.545.000	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.975.000	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165.000.000	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000	
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	85.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Perundang-Undangan		
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.558.673.800	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.106.300	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.534.500	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.574.400	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.200.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.389.258.600	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	686.980.732	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.100.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	402.880.732	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.111.700	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248.786.600	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.325.100	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	302.605.200	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	9.750.000	
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	9.750.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	292.855.200	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	77.400.000	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.650.000	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	109.100.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	41.705.200	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	328.979.000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	328.979.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	59.368.300	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	45.767.600	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	48.924.800	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	33.072.900	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	77.136.800	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	11.214.900	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	53.493.700	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.454.881.837	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.454.881.837	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	446.050.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.197.125.737	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	811.706.100	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	517.139.600	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	252.910.800	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	252.910.800	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	264.228.800	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	264.228.800	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	27.350.200	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27.350.200	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27.350.200	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.353.285.500	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3.353.285.500	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3.353.285.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	52.598.600	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	52.598.600	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	23.569.800	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	29.028.800	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.861.232.500	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.708.987.500	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	964.489.500	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	744.498.000	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	79.160.000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	79.160.000	
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	73.085.000	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	73.085.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.191.123.700	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.023.193.600	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	112.234.200	
2.07.04.2.01.03	Penyaluran dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	637.448.000	
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	27.500.800	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	246.010.600	
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.428.800	
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	11.428.800	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	97.379.300	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12.105.700	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	85.273.600	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	59.122.000	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	14.141.200	
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	44.980.800	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	248.330.700	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.170.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	35.170.000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	213.160.700	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.395.000	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.690.000	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	68.075.700	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.124.913.900	
1.06.2.08.2.13.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.124.913.900	
1.06.2.08.2.13.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.124.913.900	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	779.521.200	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	79.521.200	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	7.723.200	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	71.798.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	700.000.000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	700.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	21.588.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	21.588.000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.588.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	105.536.300	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.913.100	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	71.913.100	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.623.200	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.623.200	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	59.362.400	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.362.400	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	34.299.200	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	25.063.200	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	86.638.800	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	62.546.400	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	62.546.400	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24.092.400	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.676.400	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.416.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	72.267.200	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	9.896.400	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9.896.400	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.244.400	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.244.400	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.126.400	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.126.400	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.177.217.700	
2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.177.217.700	
2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.177.217.700	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	333.570.600	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	333.570.600	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	126.743.800	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	206.826.800	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	632.877.600	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	301.308.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	71.307.800	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	28.046.100	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	162.030.300	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	39.924.300	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	63.108.600	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	63.108.600	
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	12.048.600	
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	12.048.600	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	256.411.900	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	105.318.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	151.093.900	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	178.132.700	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	156.903.000	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	156.903.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.229.700	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.229.700	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	32.636.800	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	32.636.800	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	32.636.800	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	267.779.000	
2.10.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	267.779.000	
2.10.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	267.779.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	45.872.100	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.872.100	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.872.100	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	10.500.000	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.500.000	
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.500.000	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	183.004.900	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	183.004.900	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	183.004.900	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	28.402.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	28.402.000	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	28.402.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	20.278.518.750	
2.10.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	20.278.518.750	
2.10.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	20.278.518.750	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.713.413.550	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.788.000	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.368.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.420.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.828.094.650	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.780.954.650	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.920.000	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.220.000	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.000.000	
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	48.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Perundang-Undangan		
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.986.318.100	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.836.600	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.914.900	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.356.600	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.695.210.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.035.300	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.098.400	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.997.200	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.252.400	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.687.300	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.177.500	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	181.481.300	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.696.200	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	211.860.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	211.860.000	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	211.860.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	894.009.200	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	803.772.800	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	145.835.800	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	58.189.800	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	599.747.200	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	45.300.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	45.300.000	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	44.936.400	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	44.936.400	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.928.553.700	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.928.553.700	
2.11.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	504.487.800	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.424.065.900	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	67.145.700	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	35.629.900	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	35.629.900	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.515.800	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	31.515.800	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	84.479.700	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84.479.700	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	48.899.900	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.579.800	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	20.186.500	
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan	20.186.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	PPLH		
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	20.186.500	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.338.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.338.000	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	25.338.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	108.957.000	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.957.000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	108.957.000	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	39.040.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	39.040.000	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	39.040.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.185.535.400	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.185.535.400	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1.497.152.600	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.278.354.800	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	410.028.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.442.608.738	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.442.608.738	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.442.608.738	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.769.494.538	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.515.200	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.515.200	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.748.286.488	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.743.390.488	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.896.000	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.592.400	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.592.400	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.468.200	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.995.300	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.899.600	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.055.300	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.518.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.319.300	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.653.100	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.666.200	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.312.950	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.791.850	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.521.100	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	278.343.900	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	271.131.200	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	240.787.400	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	30.343.800	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	7.212.700	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	7.212.700	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	213.426.800	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	203.195.600	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	32.293.600	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	170.902.000	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.231.200	
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	10.231.200	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	174.481.000	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	50.325.200	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	21.370.800	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	28.954.400	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	124.155.800	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	84.202.800	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	39.953.000	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	6.862.500	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	6.862.500	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	6.862.500	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.082.598.400	
1.06.2.08.2.13.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.082.598.400	
1.06.2.08.2.13.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.082.598.400	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	4.088.559.000	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	4.088.559.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4.088.559.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.442.834.500	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.442.834.500	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.591.128.000	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	27.623.200	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	174.849.600	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	395.953.200	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.541.832.900	
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	148.516.400	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	34.584.800	
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	505.346.400	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	23.000.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.551.204.900	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.551.204.900	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	576.674.300	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.372.444.300	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	88.449.800	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.513.636.500	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.486.803.000	
1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.486.803.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.486.803.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	505.735.900	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	361.353.300	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	158.738.900	
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	66.126.600	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	72.395.000	
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	64.092.800	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	144.382.600	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	82.375.000	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	62.007.600	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	702.118.600	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	239.243.200	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	76.043.200	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	163.200.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	98.394.400	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	52.058.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	46.336.400	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	262.168.200	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	61.140.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	116.090.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32.148.000	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	52.790.200	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	102.312.800	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	102.312.800	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	278.948.500	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	128.932.700	
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	43.890.000	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	45.500.000	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	39.542.700	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga	150.015.800	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17.031.400	
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	132.984.400	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	16.650.804.305	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	16.650.804.305	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	16.650.804.305	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.634.186.605	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.140.000	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.140.000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.440.560.185	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.367.684.185	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.876.000	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.749.000	
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89.749.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	496.265.700	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.643.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.204.500	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.858.600	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.600	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	413.759.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.278.420	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.011.520	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.266.900	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.193.300	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.213.300	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.980.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11.016.617.700	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.791.993.100	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.750.740.000	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.041.253.100	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	51.533.000	
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	51.533.000	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	90.610.000	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	90.610.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	472.939.000	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	151.890.000	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	43.126.000	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	112.699.100	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.220.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	115.003.900	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.210.733.600	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.120.814.800	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	89.918.800	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	398.809.000	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	398.809.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.427.089.061	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	17.427.089.061	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	17.427.089.061	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.774.323.009	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.200.700	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.751.900	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.448.800	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.326.321.709	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.326.321.709	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	302.230.500	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68.230.500	
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	234.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.255.053.200	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.279.900	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.002.900	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.930.800	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.609.600	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.163.230.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.571.500	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.894.500	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.898.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.779.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	493.945.400	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.765.400	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	271.180.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.630.971.900	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.630.971.900	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	89.085.100	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	131.620.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	903.480.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	116.040.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	5.143.969.000	
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	101.157.800	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	145.620.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.021.794.152	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	794.879.600	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	794.879.600	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.226.914.552	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	382.637.600	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.844.276.952	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.859.708.750	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.859.708.750	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.859.708.750	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.185.167.750	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.200.400	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.170.400	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.030.000	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.270.032.500	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.073.660.500	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.372.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	395.605.300	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.677.100	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.795.500	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.860.100	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.267.700	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.004.900	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.934.400	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.934.400	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.658.800	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.289.700	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.369.100	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.736.350	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.815.750	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.920.600	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	72.167.600	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	72.167.600	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	22.824.800	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.342.800	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN	39.046.400	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	PERKOPERASIAN		
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.046.400	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	39.046.400	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	285.370.400	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	285.370.400	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	139.143.100	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	86.584.200	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	59.643.100	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	277.956.600	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	277.956.600	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	277.956.600	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	11.658.542.863	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	11.658.542.863	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	11.658.542.863	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.896.614.263	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.425.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.485.000	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.485.000	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.485.000	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.485.000	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.485.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.613.898.613	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.331.644.613	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.212.244.000	
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35.005.000	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.005.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.495.000	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.495.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	635.719.000	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.996.100	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	310.145.500	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.962.400	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.615.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.514.000	
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.000.000	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	66.514.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.647.700	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	449.809.200	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.838.500	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	797.914.950	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	234.854.950	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	563.060.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	82.437.400	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.902.400	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6.859.600	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	49.042.800	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi	26.535.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Kabupaten/Kota		
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	7.510.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	19.025.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	58.443.600	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	58.443.600	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	17.352.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	41.091.600	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	426.926.800	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	426.926.800	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	34.436.100	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	20.248.400	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	353.124.800	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	19.117.500	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	87.980.800	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	87.980.800	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	14.486.400	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	33.305.600	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	40.188.800	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	106.140.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	106.140.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	106.140.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	19.116.237.172	
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	19.116.237.172	
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	19.116.237.172	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.128.950.172	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	409.732.000	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	333.476.000	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.256.000	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.373.735.772	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.323.735.772	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.984.800	
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.984.800	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.109.400	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	86.259.900	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.198.500	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.819.200	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.005.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445.826.800	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	748.780.600	
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	748.780.600	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.400.400	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.199.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.201.400	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	442.207.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Urusan Pemerintahan Daerah		
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	234.667.200	
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207.540.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	861.856.100	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	861.856.100	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	27.728.000	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	27.918.000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	806.210.100	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	8.368.756.300	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.796.639.000	
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	542.316.600	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2.254.322.400	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	678.228.100	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	678.228.100	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	113.054.000	
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	113.054.000	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.200.000.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.200.000.000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.580.835.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1.403.425.800	
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	177.409.400	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	756.674.600	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	756.674.600	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	756.674.600	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	214.436.000	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	214.436.000	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	214.436.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	214.436.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	214.436.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	161.970.000	
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	52.466.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	28.634.800	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	28.634.800	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	28.634.800	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	28.634.800	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.634.800	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	28.634.800	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.218.200.000	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.218.200.000	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.218.200.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	196.500.000	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	196.500.000	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	196.500.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN	1.040.777.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	TRADISIONAL		
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.040.777.000	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	896.197.000	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	144.580.000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	361.482.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	361.482.000	
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	138.250.000	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	223.232.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	619.441.000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	219.331.000	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	26.181.000	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	193.150.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	400.110.000	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	234.600.000	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	86.530.000	
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	78.980.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	9.523.878.426	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.523.878.426	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.523.878.426	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.796.319.826	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	266.088.800	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	225.183.200	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.502.800	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.402.800	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.970.133.682	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.874.514.082	
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.481.200	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	3.941.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Akhir Tahun SKPD		
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.197.200	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	207.719.400	
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	175.079.400	
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.640.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.263.900	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.966.300	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.152.800	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.112.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445.032.800	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.851.544	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	218.100.000	
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.881.900	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.869.644	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.262.500	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.482.800	
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.779.700	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.513.975.000	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.226.045.800	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	50.628.400	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	27.241.400	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.053.500	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	799.622.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	216.154.500	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	89.346.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	287.929.200	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	265.489.700	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.439.500	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	213.583.600	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	213.583.600	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	4.399.000	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	209.184.600	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.424.398.600	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.424.398.600	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.424.398.600	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	809.901.500	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	390.255.900	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	338.015.100	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	19.955.700	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	32.285.100	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	231.889.100	
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	195.972.400	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	35.916.700	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	187.756.500	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	36.000.000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	151.756.500	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	427.470.300	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	234.666.500	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	234.666.500	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	192.803.800	
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	192.803.800	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	187.026.800	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	187.026.800	
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	187.026.800	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.141.396.600	
2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	4.141.396.600	
2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	4.141.396.600	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.741.345.700	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	227.482.500	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	72.559.500	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	154.923.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.513.863.200	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	686.342.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.777.048.200	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.473.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	137.346.200	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	137.346.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	137.346.200	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	262.704.700	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	235.855.700	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	235.855.700	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	26.849.000	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.849.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.991.845.800	
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.991.845.800	
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.991.845.800	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	839.242.700	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	839.242.700	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	645.389.000	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	109.163.500	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	84.690.200	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	910.448.500	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	910.448.500	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	183.772.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	726.676.500	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	242.154.600	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	242.154.600	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	90.094.100	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	152.060.500	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	56.810.008.224	
2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	56.810.008.224	
2.09.3.27.3.25.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	56.644.071.024	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.219.999.974	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	503.742.700	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	413.555.300	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.187.400	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.666.861.674	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.473.065.674	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	193.796.000	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	593.069.000	
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	188.929.000	
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	404.140.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	786.885.800	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.762.100	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.327.700	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.974.000	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.184.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	521.638.000	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	685.404.800	
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	685.404.800	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.400.000	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.400.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.636.000	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	546.628.200	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.007.800	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.628.174.400	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.053.733.900	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.053.733.900	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.112.950.100	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	1.469.885.900	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	643.064.200	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	461.490.400	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	175.210.400	
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	286.280.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	21.909.887.700	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	21.788.447.500	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	35.873.500	
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	252.914.100	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	20.835.518.900	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	664.141.000	
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	121.440.200	
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	121.440.200	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	736.005.700	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	349.933.300	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	178.863.900	
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	171.069.400	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	93.969.200	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	93.969.200	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	292.103.200	
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	292.103.200	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	757.118.350	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	757.118.350	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	757.118.350	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.392.884.900	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.392.884.900	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	276.587.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	657.378.500	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.458.919.400	
2.09.3.27.3.25.01.0003	Bidang Peternakan	165.937.200	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	165.937.200	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	165.937.200	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	165.937.200	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.845.298.700	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.845.298.700	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.845.298.700	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	57.010.000	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	35.230.000	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35.230.000	
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	21.780.000	
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	21.780.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	949.088.500	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	882.980.500	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	150.979.600	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	732.000.900	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	66.108.000	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35.971.600	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30.136.400	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	114.664.100	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	114.664.100	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	75.337.500	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	39.326.600	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	467.513.800	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	467.513.800	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	430.874.700	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	36.639.100	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	210.812.300	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	210.812.300	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	144.209.600	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	66.602.700	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	46.210.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	46.210.000	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	46.210.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.212.895.900	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.212.895.900	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.212.895.900	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	196.141.800	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	196.141.800	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	196.141.800	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	79.758.300	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	79.758.300	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	79.758.300	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	936.995.800	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	936.995.800	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	124.230.800	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	812.765.000	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	309.829.000	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	309.829.000	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	309.829.000	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	111.352.000	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	111.352.000	
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.985.000	
3.32.03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	96.367.000	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	198.477.000	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	198.477.000	
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	15.117.000	
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	183.360.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	85.609.169.031	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	85.609.169.031	
4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN UMUM	49.302.375.581	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.302.375.581	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.193.375.600	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.139.551.800	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.823.800	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.807.978.868	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.660.319.668	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	102.610.000	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.838.700	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.210.500	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	321.725.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	321.725.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.921.700.690	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	516.188.600	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.803.689.190	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	741.307.300	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	986.802.300	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	783.267.300	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.090.446.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.493.794.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.524.000.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.387.667.200	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.582.126.800	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.409.563.623	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.655.565.250	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	529.404.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.396.407.273	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.736.775.000	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.091.412.100	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	1.154.237.800	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	260.197.800	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	494.040.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	
4.01.0.00.0.00.01.0002	BAGIAN ORGANISASI	1.561.558.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.561.558.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.561.558.000	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	492.405.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	386.225.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	682.928.000	
4.01.0.00.0.00.01.0003	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.725.674.700	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.725.674.700	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.725.674.700	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	561.164.500	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	582.800.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	581.710.200	
4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN PEMERINTAHAN	1.602.573.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.602.573.000	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.155.418.000	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	642.378.300	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	304.447.700	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	208.592.000	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	447.155.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	447.155.000	
4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	27.212.277.200	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	27.212.277.200	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	27.212.277.200	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.103.938.200	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	11.447.958.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	5.660.381.000	
4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN HUKUM	1.058.291.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.058.291.200	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.058.291.200	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	554.542.200	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	341.727.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	162.022.000	
4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	981.817.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	981.817.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	981.817.000	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	361.650.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	227.840.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	392.327.000	
4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	989.243.700	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	989.243.700	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	794.039.500	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	88.765.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	193.619.500	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	405.334.000	
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	106.321.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	195.204.200	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	40.123.000	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	93.452.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	61.629.200	
4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.175.358.650	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.175.358.650	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.175.358.650	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	398.749.000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	387.438.750	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan	389.170.900	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Jasa		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	42.373.676.826	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	42.373.676.826	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	42.373.676.826	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.337.049.326	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316.755.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.689.800	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.319.600	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.372.000	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	36.401.200	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	21.340.800	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	147.476.300	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.155.300	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.477.135.296	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.426.783.696	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.366.500	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.176.700	
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.023.600	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.784.800	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	484.580.000	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	69.980.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	414.600.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.331.499.000	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.017.000	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	352.706.500	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	95.265.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	518.015.500	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.000.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	146.650.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	104.700.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	104.600.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.896.545.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.223.251.400	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	491.100.000	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214.738.900	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.517.412.500	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.098.740.550	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	291.040.550	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.075.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.850.000	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	413.775.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.579.172.480	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.131.151.180	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	378.021.300	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	825.915.600	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	825.915.600	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.036.627.500	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.171.332.500	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	955.276.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.495.691.700	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	595.364.800	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	125.000.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	250.151.800	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	13.968.800	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	12.452.200	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	84.306.800	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	82.384.000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	11.942.800	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	45.097.200	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	214.005.200	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	30.187.800	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	31.966.400	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	18.042.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30.185.200	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15.616.000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	9.134.600	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	28.519.200	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	50.354.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.306.552.600	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	872.865.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.062.478.600	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	175.909.500	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	195.299.500	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.151.332.700	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	57.150.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	37.937.300	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.056.245.400	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	503.263.600	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	503.263.600	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.439.989.100	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.000.813.000	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	90.637.100	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	106.430.800	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	242.108.200	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	12.293.568.865	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12.293.568.865	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12.293.568.865	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.621.244.665	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.497.600	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.726.400	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	39.030.000	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.741.200	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.704.973.015	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.630.887.415	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.787.000	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.809.000	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.489.600	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	617.353.200	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	587.353.200	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	960.226.200	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.904.900	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	486.085.400	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.921.000	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.435.200	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356.879.700	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	843.693.800	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.122.200	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	614.571.600	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.500.850	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.570.050	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.930.800	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.443.030.500	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.088.428.000	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	132.540.000	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	40.852.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	197.850.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	717.186.000	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	174.600.000	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	124.340.000	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	50.260.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	180.002.500	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	137.330.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	42.672.500	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.229.293.700	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.151.638.700	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	439.155.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	244.157.700	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	112.441.200	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	109.640.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.756.800	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	53.856.800	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	34.847.200	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	107.784.000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	546.873.600	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	143.393.800	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30.570.400	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	13.436.400	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	58.881.800	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	122.752.400	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	111.481.400	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	32.633.600	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	33.723.800	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	530.781.400	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	115.618.000	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	9.426.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Infrastruktur		
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.821.600	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	142.818.000	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	237.097.800	
5.02	KEUANGAN	266.285.525.151	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	266.285.525.151	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	266.285.525.151	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.181.633.511	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239.682.400	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.349.700	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	115.080.100	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.252.600	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.388.297.642	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.738.181.342	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.985.800	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.125.500	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	454.005.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.574.175.200	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	133.863.000	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67.312.200	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.373.000.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	859.717.809	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	92.394.100	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	427.917.909	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.490.800	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.500.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292.415.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	289.710.000	
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	289.710.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	896.689.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.768.000	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.921.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.000.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.933.361.460	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	369.196.900	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	669.440.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	894.724.560	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	240.549.534.640	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.926.431.200	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	146.020.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	144.770.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	534.733.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	36.860.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	323.800.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	321.120.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	419.128.200	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.716.429.800	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	482.036.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	54.382.400	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	265.132.000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	334.824.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	392.417.500	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	194.775.700	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	992.862.200	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.010.347.300	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	334.845.900	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	134.900.900	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	105.033.100	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	237.353.700	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	271.049.400	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	927.164.300	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	233.896.326.340	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	207.929.441.840	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	24.500.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.466.884.500	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.243.230.400	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.243.230.400	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	238.774.800	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	102.931.400	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	139.136.200	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	108.460.100	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	386.150.500	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	49.641.500	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	265.358.200	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	856.966.000	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	95.811.700	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.311.126.600	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.311.126.600	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	288.761.800	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	225.381.800	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	285.280.500	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	214.859.900	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	402.976.400	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	91.327.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	243.875.200	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	189.242.800	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	369.421.200	
5.03	KEPEGAWAIAN	10.997.336.640	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.997.336.640	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.997.336.640	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.432.832.040	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.459.000	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.827.000	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.190.000	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.442.000	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.018.465.862	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.927.306.862	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.709.000	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.450.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.020.528	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.162.900	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.547.628	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.310.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	322.053.800	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	322.053.800	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.278.400	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.278.400	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.554.450	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.674.450	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.880.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.564.504.600	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	395.768.700	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	133.942.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	67.933.000	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	55.100.800	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi	138.792.900	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Kepegawaian		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	173.533.000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	82.310.600	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	91.222.400	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	3.618.097.900	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	128.255.700	
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1.544.776.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	454.163.000	
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	370.760.800	
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	1.120.142.400	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	377.105.000	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	124.168.000	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	103.675.000	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	55.380.000	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	66.862.000	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	27.020.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.431.528.000	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.431.528.000	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.431.528.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.431.528.000	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.431.528.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.431.528.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.103.407.900	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.103.407.900	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.103.407.900	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.103.407.900	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	318.520.800	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	179.220.000	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	139.300.800	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.443.160.000	
5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	94.320.000	
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	369.320.000	
5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	94.320.000	
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	104.220.000	
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	254.960.000	
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	94.320.000	
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	431.700.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	341.727.100	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	341.727.100	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	14.656.325.310	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	14.656.325.310	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	14.656.325.310	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.487.832.910	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.004.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.320.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.684.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.119.790.460	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.119.790.460	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	298.164.000	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.244.000	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	271.920.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.394.003.700	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	622.394.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.290.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	4.799.700	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Perundang-undangan		
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	715.520.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	470.209.300	
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	470.209.300	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.790.450	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.996.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.057.950	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.736.500	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.871.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.366.200	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	603.504.800	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.374.460.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.216.070.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	94.620.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	102.400.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	14.300.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	7.150.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	2.892.100.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	105.500.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	158.390.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	36.790.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	121.600.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	794.032.400	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	794.032.400	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	62.750.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	119.230.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	562.612.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	49.440.400	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	43.174.050.798	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN LAMPIHONG	5.078.752.091	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN LAMPIHONG	5.078.752.091	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.244.999.691	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.206.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.806.900	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.399.100	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.586.979.191	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.586.979.191	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.527.900	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.586.700	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.941.200	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.021.900	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.896.800	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.564.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.561.100	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.264.700	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.064.700	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.200.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.617.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	47.617.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	47.617.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	390.347.300	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	329.823.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	329.823.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	60.524.300	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60.524.300	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	65.011.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65.011.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	65.011.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	213.055.600	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	213.055.600	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	213.055.600	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	117.721.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	117.721.500	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46.516.300	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	56.208.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.997.200	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BATUMANDI	5.007.028.123	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BATUMANDI	5.007.028.123	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.338.926.723	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.335.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.335.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.687.229.573	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.398.656.573	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	285.104.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.469.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.895.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.495.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79.400.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.114.900	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.375.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.276.600	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.500.400	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.973.900	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.989.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.030.900	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.441.800	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.589.100	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.321.350	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.631.450	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.153.100	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.536.800	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.518.300	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.518.300	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.518.300	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	298.101.400	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	273.101.400	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	10.301.400	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Kecamatan		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	262.800.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	25.000.000	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	25.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.167.400	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.167.400	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.167.400	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	256.419.300	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	256.419.300	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	96.219.300	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	160.200.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	93.895.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	93.895.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.051.400	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.301.400	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.298.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	17.244.200	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	40.000.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN AWAYAN	4.647.870.970	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN AWAYAN	4.647.870.970	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.774.787.670	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.902.900	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.985.300	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.217.600	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.133.847.470	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.048.269.970	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.900.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.677.500	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.500.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.500.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.542.300	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.968.300	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.902.900	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.919.100	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.752.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.892.700	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.892.700	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.809.300	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.669.200	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.140.100	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.293.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.442.400	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.104.600	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.746.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	103.532.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	DAN PELAYANAN PUBLIK		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	103.532.500	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	103.532.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	309.472.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	309.472.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	309.472.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	68.416.600	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68.416.600	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	68.416.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	235.634.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	235.634.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	235.634.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	156.028.200	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	156.028.200	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	122.860.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	33.168.200	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN HALONG	4.362.804.420	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN HALONG	4.362.804.420	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.547.659.020	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.947.800	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.438.200	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	271.400	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	238.200	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.211.298.320	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.074.742.320	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.556.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.167.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.731.800	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.436.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.983.400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.805.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.178.400	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.261.700	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.102.700	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.159.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	138.256.400	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	138.256.400	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	138.256.400	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	346.500.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	321.500.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	321.500.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	25.000.000	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	25.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.886.400	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.886.400	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.886.400	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	166.921.800	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	166.921.800	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	166.921.800	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	160.580.800	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	160.580.800	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	39.984.400	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	111.900.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.696.400	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN JUAI	4.214.288.091	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN JUAI	4.214.288.091	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.293.180.891	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.148.800	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.608.600	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.879.600	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.660.600	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.887.368.991	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.798.827.791	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	88.541.200	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.720.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.720.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.127.700	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.460.900	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.706.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.040.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.920.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.299.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.260.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	86.905.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	dan Listrik		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.133.800	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.516.400	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.135.100	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.381.300	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.438.100	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	68.737.700	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.737.700	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.700.400	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.700.400	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	349.937.900	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	303.237.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.129.200	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	39.924.900	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	258.182.900	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	46.700.900	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	46.700.900	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	82.544.500	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82.544.500	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	82.544.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	247.950.400	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	247.950.400	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	72.747.200	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	175.203.200	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	163.236.300	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	163.236.300	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	57.915.300	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	59.602.600	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	45.718.400	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN PARINGIN	9.363.610.783	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN PARINGIN	7.103.331.983	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.306.517.283	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.753.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.753.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.042.868.533	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.042.868.533	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.996.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.996.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.246.500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.812.200	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.332.300	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.100.200	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.801.600	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	293.200.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	SKPD		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.678.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	26.678.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.724.750	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.296.550	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592.428.200	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.250.500	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.658.500	
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	53.592.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.328.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	88.328.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	88.328.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	297.425.200	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	229.307.200	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8.707.200	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	220.600.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	68.118.000	
7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	14.414.400	
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	14.414.400	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	39.289.200	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.025.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	SKPD		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.678.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	26.678.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.724.750	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.296.550	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592.428.200	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.250.500	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.658.500	
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	53.592.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.328.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	88.328.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	88.328.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	297.425.200	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	229.307.200	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8.707.200	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	220.600.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	68.118.000	
7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	14.414.400	
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	14.414.400	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	39.289.200	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.025.200	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.810.800	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.810.800	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.214.400	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.214.400	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	249.900.100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	249.900.100	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	249.900.100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	139.136.200	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	139.136.200	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.001.800	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.119.600	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.740.300	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.940.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.406.500	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	66.928.000	
7.01.0.00.0.00.06.0001	KELURAHAN PARINGIN KOTA	1.130.049.800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.130.049.800	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.130.049.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	830.049.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300.000.800	
7.01.0.00.0.00.06.0002	KELURAHAN PARINGIN TIMUR	1.130.229.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.130.229.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.130.229.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	728.565.100	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	401.663.900	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TEBING TINGGI	3.618.537.350	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TEBING TINGGI	3.618.537.350	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.933.540.450	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.469.600	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.770.100	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.799.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.900.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.476.757.350	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.434.557.350	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.200.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.500.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.500.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.311.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	900.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.335.200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.313.300	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.362.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.400.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.290.900	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.290.900	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.756.600	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.442.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.914.600	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.455.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.190.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.600.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.665.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55.774.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	55.774.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	55.774.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	220.572.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	183.374.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	183.374.500	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	37.198.000	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	37.198.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.798.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.798.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.798.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	227.280.200	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	227.280.200	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	227.280.200	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	140.572.200	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	140.572.200	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	67.686.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	72.886.200	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	6.881.158.970	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	5.775.017.970	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.119.586.370	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.727.100	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.727.100	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.201.135.370	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.164.875.370	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.260.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.443.300	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.443.300	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	375.654.700	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.324.700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.026.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.304.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.859.400	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.317.600	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.541.800	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.518.700	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.176.800	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.341.900	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.247.800	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.847.800	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.400.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.560.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	43.560.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	43.560.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	378.652.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	234.300.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	234.300.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	83.040.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.700.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	79.340.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	61.312.500	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	61.312.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.620.000	
7.01.04.7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	26.620.000	
7.01.04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	26.620.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	114.129.100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	114.129.100	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	114.129.100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	92.470.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92.470.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	41.000.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14.520.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	36.950.000	
7.01.0.00.0.00.08.0001	KELURAHAN BATU PIRING	1.106.141.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.106.141.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.106.141.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	785.770.400	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	320.370.600	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.735.021.134	
1.05.8.01.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.735.021.134	
1.05.8.01.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.735.021.134	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.452.940.734	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.501.900	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.690.000	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.933.200	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.384.600	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.494.100	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.078.352.734	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.036.869.134	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.739.500	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39.744.100	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.308.300	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.108.300	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.200.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	716.843.900	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.368.600	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.571.900	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.739.400	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.057.600	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	490.106.400	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.317.600	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.060.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.400.000	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.116.500	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.741.100	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.616.300	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.667.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.948.800	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.632.775.600	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.632.775.600	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4.589.424.000	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	43.351.600	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.628.925.300	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.628.925.300	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	317.532.600	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500.607.800	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	810.784.900	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	284.845.100	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	284.845.100	
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	142.433.600	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	142.411.500	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	124.156.400	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	124.156.400	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	98.759.200	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25.397.200	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	611.378.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	611.378.000	
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59.033.300	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	273.943.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Penanganan Konflik di Daerah		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	104.342.000	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	66.252.800	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	107.806.900	

4.2 Perkiraan Plafon Anggaran Belanja Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Secara umum alokasi perkiraan plafon sementara belanja daerah untuk tahun anggaran 2023 Perubahan diasumsikan sebagaimana tabulasi berikut;



Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	509.971.873.956
2	Belanja Barang dan Jasa	490.868.231.328
3	Belanja Hibah	54.967.268.900
4	Belanja Bantuan Sosial	4.272.825.737
5	BELANJA MODAL	207.609.195.800
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.237.440.600
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.830.109.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	164.919.729.500
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	141.296.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	480.620.700
6	Belanja Tidak Terduga	24.500.000.000
7	Belanja Bagi Hasil	1.466.884.500
8	Belanja Bantuan Keuangan	207.929.441.840
	TOTAL	1.501.585.722.061



BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

APBD pada Tahun 2023 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp150.000.000.000,00. Upaya untuk menutup defisit anggaran tersebut, diutamakan berasal dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang tidak akan menjadi beban bagi Daerah di masa mendatang yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, sebesar Rp. 190.000.000.000,00. Di samping penerimaan pembiayaan, terdapat pula pengeluaran Pembiayaan Daerah, yang pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 40.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Daerah kepada Perusahaan Daerah. Target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel: 5.1

Perkiraan Rincian Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	190.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	190.000.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	190.000.000.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	40.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	150.000.000.000	